



# LAPORAN KINERJA



## SEKRETARIAT



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI





# LAPORAN KINERJA

# 2023

## SEKRETARIAT

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



HARMONIS ENERGIK BERMUTU AKUNTABEL TRANSPARAN



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, atas rahmat dan karunia-Nya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2023 menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berhasil merealisasikan melebihi target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan beserta strategi penyelesaiannya, yang akan menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2023.

Jakarta, 26 Januari 2024

**Sekretaris Badan,**



**Haridz Muksin**

**NIP 19700122199001100**



# DAFTAR ISI

Halaman Judul	iii
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	5
B. Dasar Hukum	6
C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	7
1. Tugas dan Fungsi	7
2. Struktur Organisasi	7
D. Isu Strategis	8
E. Peran Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Visi Dan Misi	9
B. Matriks Rencana Strategis	9
C. Tujuan Strategis	9
D. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
E. Aktivitas Prioritas	11
1. Pengelolaan Widyabasa	11
2. Penyusunan Modul Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	11
3. Penyusunan Soal PPPK Widyabasa	13
4. Kerja sama	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
a. Program dan Anggaran	22
b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	23
c. Data dan Informasi	25
d. Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Kerja Sama	26
e. Kepegawaian	28

B. Realisasi Anggaran _____	43
1. Capaian Anggaran _____	43
2. Efisiensi _____	47
3. Inovasi, Penghargaan, Program Kolaborasi/Crosscutting _____	48

#### **BAB IV PENUTUP** \_\_\_\_\_ 59

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Organisasi _____	59
B. Langkah Yang Akan Dilakukan Di Masa Mendatang Untuk Meningkatkan Kinerja _____	60

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Sandingan Capaian dan Target IKK SAKIP 2022--2024	19
Tabel 2. Nilai Sakip Seluruh Satker tahun 2022--2023	20
Tabel 3. Tabel Sandingan Capaian dan Target IKK 2022--2024	30
Tabel 4. Rincian Saldo Temuan Pemeriksaan BPK	38
Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa	38
Tabel 5. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendikbudristek	39
Tabel 6. Informasi kepemilikan prasarana Balai/Kantor Bahasa	40
Tabel 7. Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran per RO	46
Tabel 8. Capain dan Realisasi anggaran per IKK	48
Tabel 9. Capaian IKK tahun 2023	59
Tabel 10. Sandingan Pagu Awal Pagu Akhir dan Realisasi per IKK tahun 2023	59
Tabel 11. Sandingan Realisasi Anggaran per KRO tahun 2022 dan 2023	60

# DAFTAR FOTO

Rapat Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan	23
Kegiatan Penyusunan Lakin Eselon I	24
<i>Press Tour</i> Kongres Bahasa Indonesia XII	27
Kerja sama Badan Bahasa dengan	27
Pemerintah Daerah Sumatera Barat	27
Penyusunan Modul KKLP	28
Ruang Pelayanan sebelum dan sesudah renovasi	32
Renovasi Ruang Kepala Badan	34
Renovasi Ruang Kepala Badan	34
Pengelolaan arsip inaktif	35
Workshop Pengelolaan APBN tahun 2023	36
Penyusunan laporan keuangan	38

# IKHTISAR EKSEKUTIF

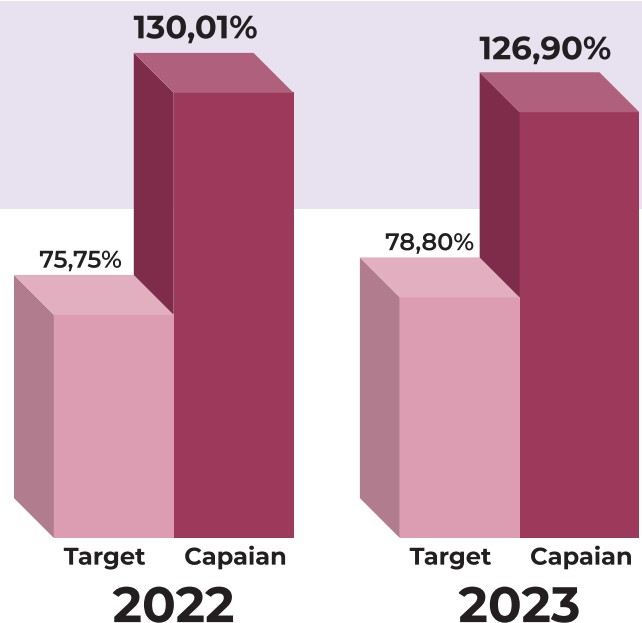
Laporan kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran kegiatan dengan dua indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja ini.

Sasaran kegiatan di Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2023 adalah Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki dua indikator kinerja, yaitu (1) Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB (78,80%), dan (2) Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (5 satker).

Pada tahun 2023, alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp131.133.680.000,00. Jumlah anggaran tersebut didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat BPP Bahasa.

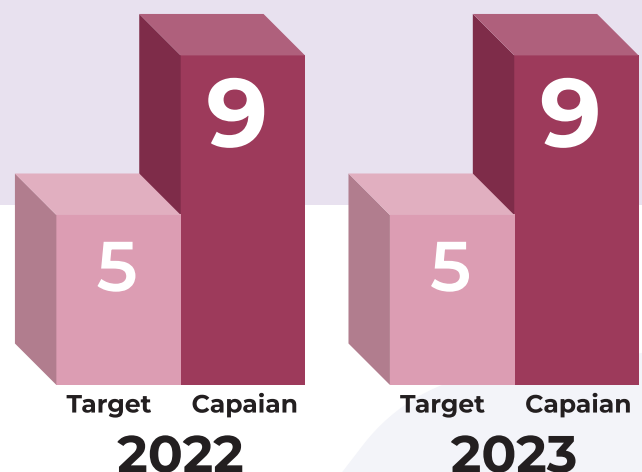
## Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

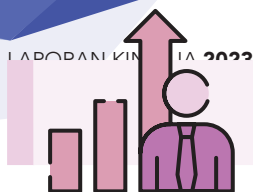
Hasil penilaian akhir Inspektorat Jenderal terhadap akuntabilitas kinerja satker di lingkungan BPP Bahasa dengan target 78,78% predikat minimal BB atau sebanyak 34 satker, tercapai sebanyak 34 satker.



## Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)

Satker di BPP Bahasa yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tahun 2023 adalah sebanyak sembilan satker atau 180%, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh KemenpanRB.

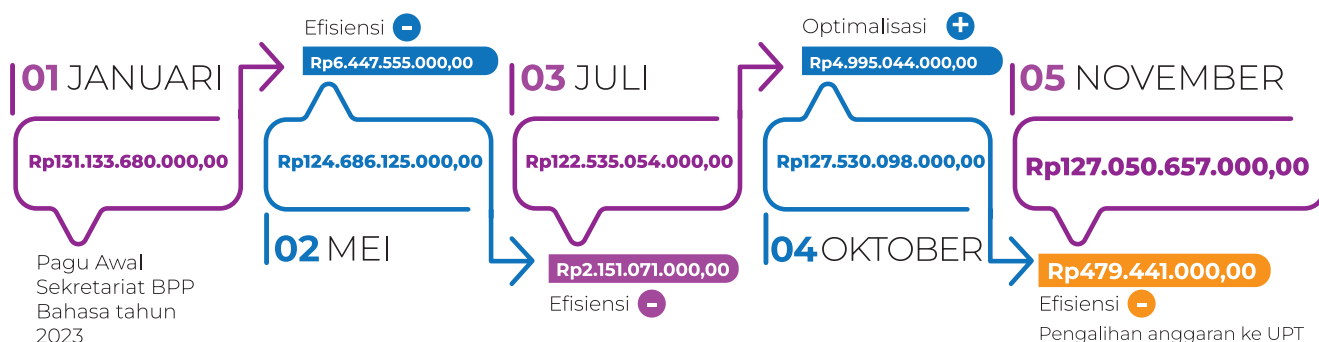




## Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp131.133.680.000,00. Jumlah anggaran tersebut didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat BPP Bahasa.

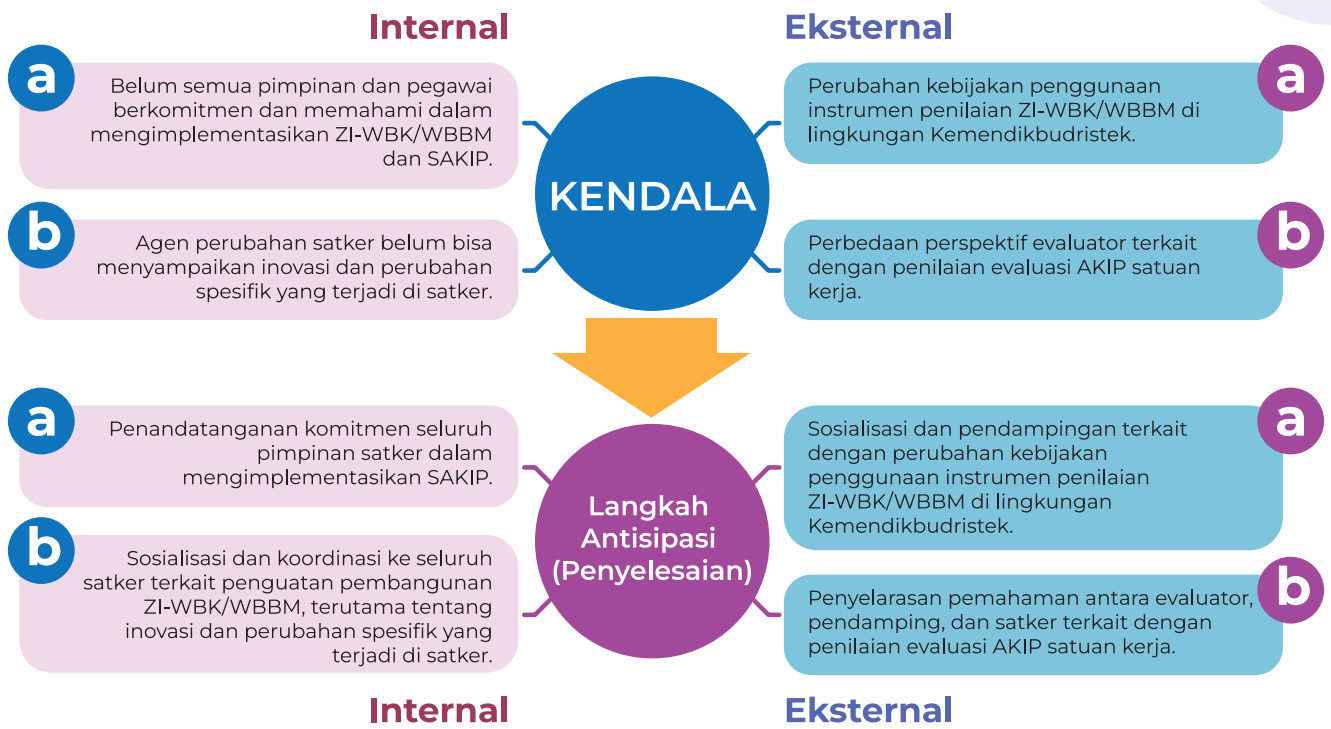
Pada perjalanannya, anggaran Sekretariat BPP Bahasa mengalami lima kali penyesuaian jumlah pagu anggaran, sebagai berikut.



Tahun	2022			2023			Deviasi Pagu 2022 dan 2023
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pegawai	69.973.056.000	69.335.904.988	99,09	75.122.848.000	74.961.234.972	99,78	5.149.792.000
Barang	34.128.376.000	33.735.394.186	98,85	47.346.303.000	45.893.280.465	96,93	13.217.927.000
Modal	421.377.000	421.223.700	99,96	4.581.506.000	4.580.418.609	99,98	4.160.129.000
<b>Total</b>	<b>104.522.809.000</b>	<b>103.492.522.874</b>	<b>99,01</b>	<b>127.050.657.000</b>	<b>125.434.934.046</b>	<b>98,73</b>	<b>12.228.264.000</b>

Total pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa per Desember 2023 sebesar Rp127.050.657.000,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023, sebesar Rp 125.343.943.046,00 atau 98,73%. Berikut merupakan kendala yang dialami dan langkah antisipasi yang dilakukan Sekretariat BPP Bahasa dalam mencapai target kinerja tahun 2023, serta langkah antisipasi. Kendala.







# BAB I

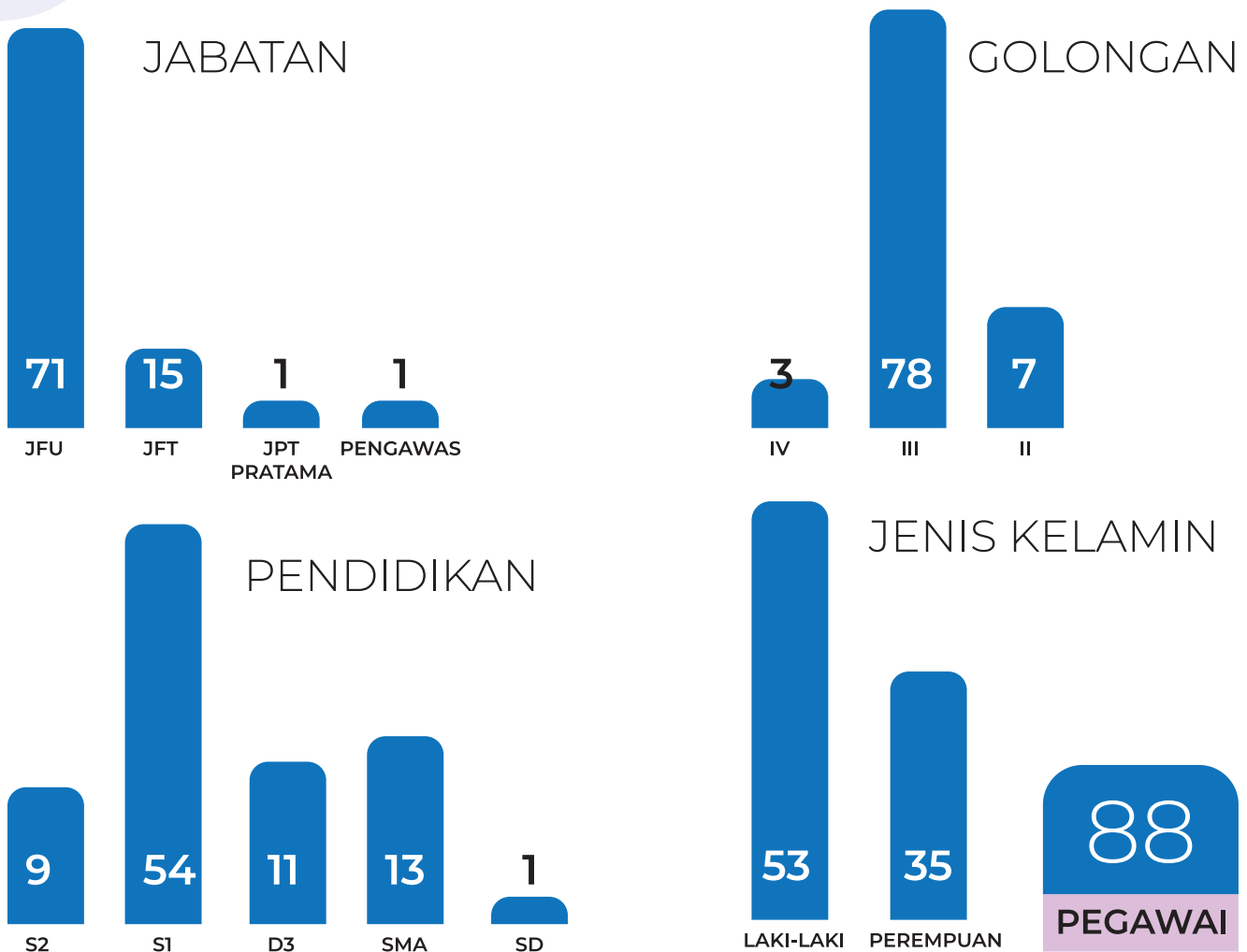
## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum



Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) merupakan salah satu satker eselon II di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat BPP Bahasa terbentuk pada tahun 2010 setelah disahkannya Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan peraturan ini, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, unit utama (eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wilayah kerja Sekretariat Badan BPP Bahasa melingkupi seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas Sekretariat BPP Bahasa adalah melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan. Sekretariat BPP Bahasa dipimpin oleh Hafidz Muksin dengan jumlah SDM sebanyak 88 orang ASN dan 14 orang PPNN. Berikut klasifikasi pegawai di lingkungan Sekretariat BPP Bahasa berdasarkan golongan dan kualifikasi pendidikan.



## B. Dasar Hukum

<p><b>1</b> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006</p> <p>tentang</p> <p>Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p>	<p><b>2</b> Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014</p> <p>tentang</p> <p>Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</p>	<p><b>3</b> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014</p> <p>tentang</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p><b>4</b> Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021</p> <p>tentang</p> <p>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)</p>
<p><b>5</b> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014</p> <p>tentang</p> <p>Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p><b>6</b> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021</p> <p>tentang</p> <p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi</p>	<p><b>7</b> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021</p> <p>tentang</p> <p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p><b>8</b> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022</p> <p>tentang</p> <p>Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024</p>
<p><b>9</b> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022</p> <p>tentang</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	<p><b>10</b> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023</p> <p>tentang</p> <p>Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</p>	<p><b>11</b> Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 388/O/2021</p> <p>tentang</p> <p>Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>	<p><b>12</b> Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022</p> <p>tentang</p> <p>Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020-2024</p>

## C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

### 1. Tugas dan Fungsi

PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 28 TAHUN 2021

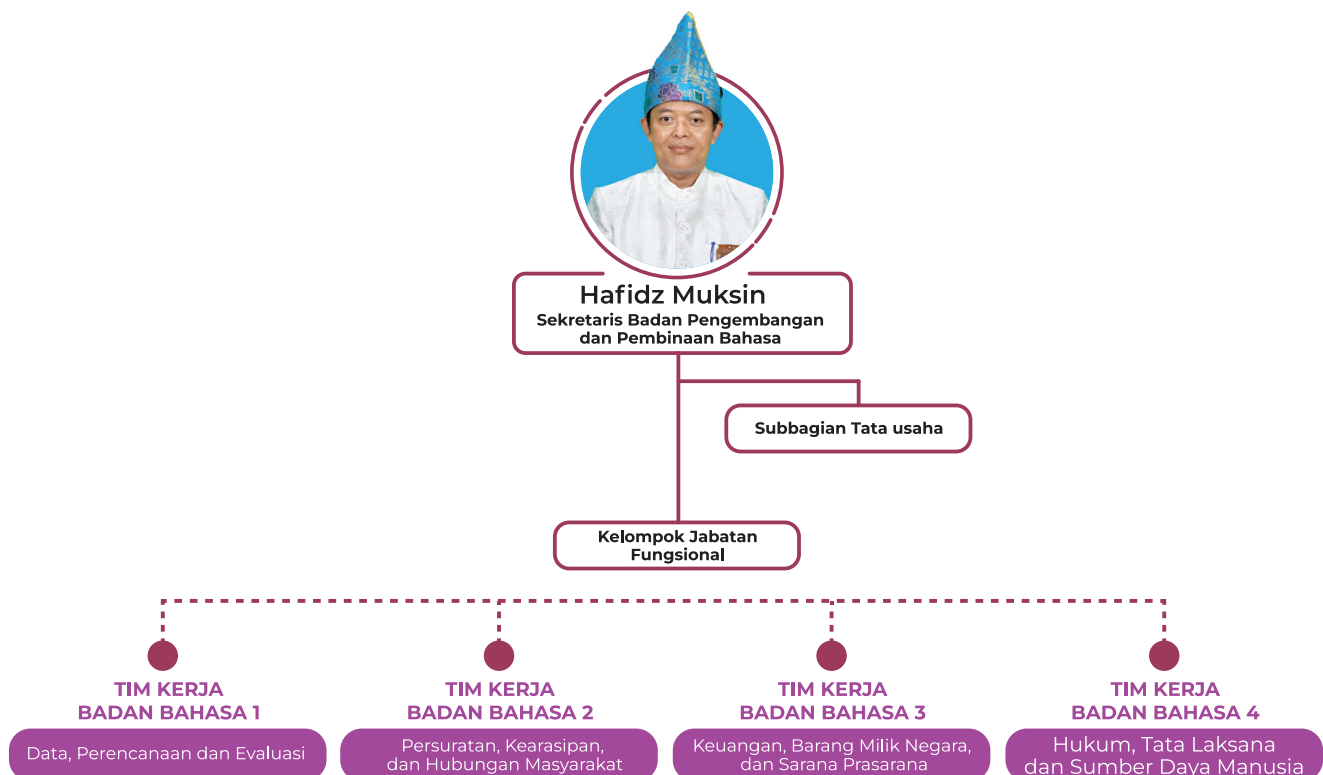
#### TUGAS

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

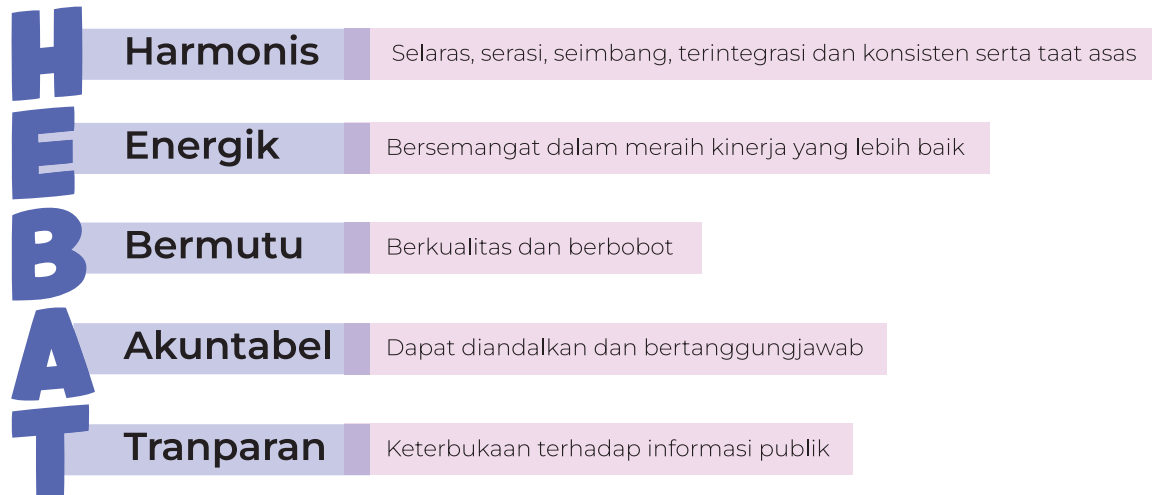
#### FUNGSI

<b>1</b>	Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang bahasa dan sastra.	<b>7</b>	Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan.
<b>2</b>	Pengelolaan data dan informasi di bidang bahasa dan sastra	<b>8</b>	Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
<b>3</b>	Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang bahasa dan sastra.	<b>9</b>	Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.
<b>4</b>	Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Badan.	<b>10</b>	Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang bahasa dan sastra.
<b>5</b>	Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan.	<b>11</b>	Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan.
<b>6</b>	Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksanaan di lingkungan Badan.		

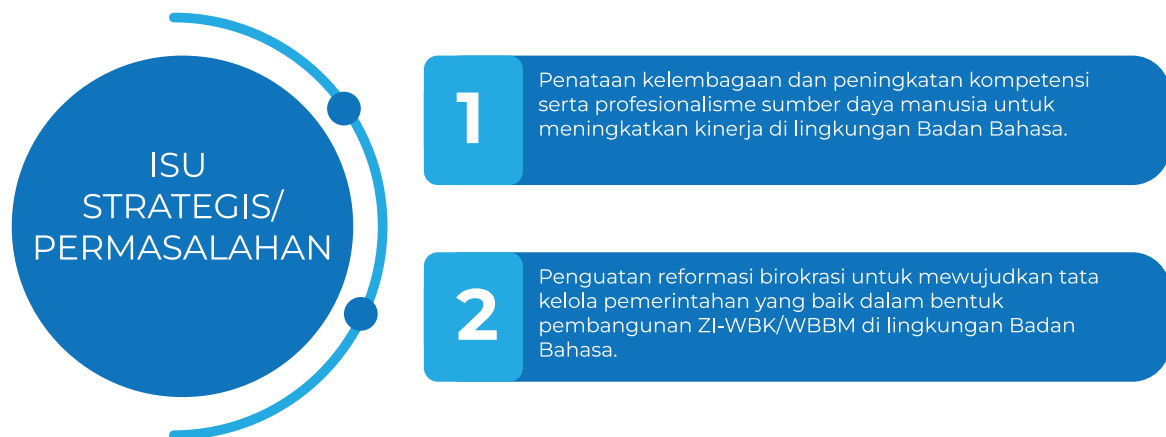
### 2. Struktur Organisasi



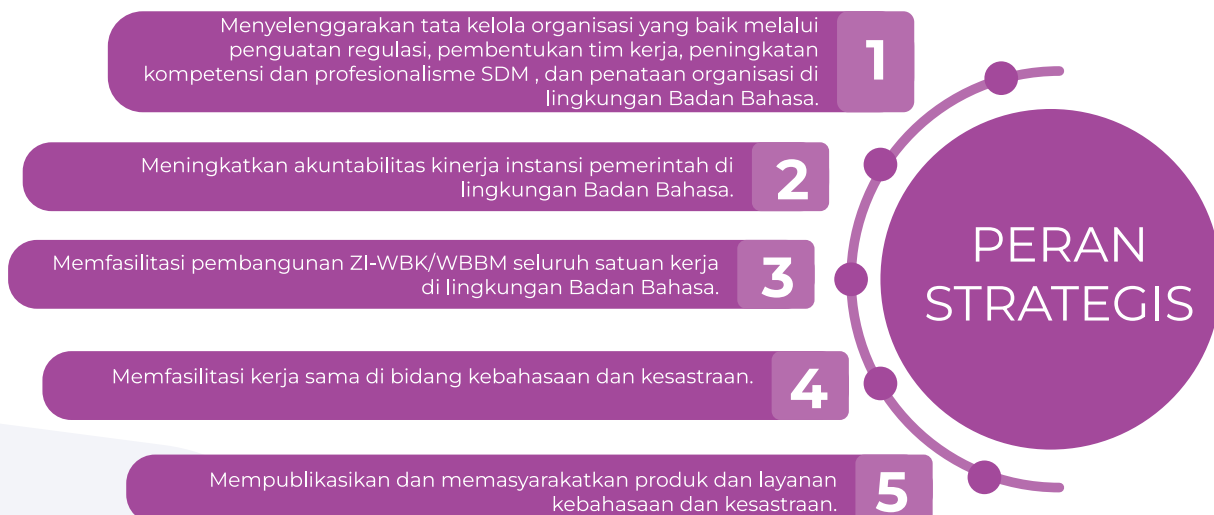
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Bahasa, serta untuk melakukan upaya perbaikan kinerja dengan terus melakukan peningkatan kualitas tatakelola kelembagaan meliputi peningkatan seluruh layanan, Sekretariat Badan Bahasa memiliki budaya kerja yaitu HEBAT.



## D. Isu Strategis



## E. Peran Strategis



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi Dan Misi

#### VISI

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

#### MISI

### B. Matriks Rencana Strategis

Sekretariat BPP Bahasa menetapkan sasaran, indikator dan target tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar 2020	Satuan	Target Tahun		
			2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,70	%	75,75	78,8	81,8
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	Satker	5	5	5

### C. Tujuan Strategis

Sekretariat BPP Bahasa memiliki tujuan strategis dan indikator tujuan strategis sebagai berikut.



Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Satuan	Target tahun 2024
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	4

## D. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
(SK 1) Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(IKK 1.1) Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SKIP Minimal BB	78.80
	(IKK 1.2) Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp131.133.680.000,00
		<b>Total</b>	Rp131.133.680.000,00

### Perjanjian Kinerja Akhir

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp127.050.657.000,00
		<b>Total</b>	Rp127.050.657.000,00

Perubahan perjanjian kinerja Sekretariat Badan disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran semula Rp131.133.680.000,00 menjadi Rp127.050.657.000,00. Penyesuaian anggaran digunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja



operasional di dua satker Badan Bahasa, yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengembalian belanja pegawai yang terkena Automatic Adjustment (AA) ke Bendahara Umum Negara (BUN), dan digunakan untuk pembelian kendaraan dinas jabatan dan operasional di lima satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## E. Aktivitas Prioritas

Berikut merupakan beberapa aktivitas prioritas Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang turut mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan.

### 1. Pengelolaan Widyabasa

Dalam mendukung tugas dan fungsi di bidang bahasa dan sastra, pada tahun 2022 BPP Bahasa telah berhasil mewujudkan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa.

Pembahasan terkait jabatan fungsional widyabasa berlangsung sejak tahun 2019 dan dilakukan penyusunan naskah akademik di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Di tahun tersebut penyusunan tugas jabatan, butir kegiatan, instrumen uji beban, pengelolaan data dan validasi, penyusunan dan harmonisasi rancangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Reviu oleh Sekretariat Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Badan Bahasa telah mengangkat 280 pejabat fungsional widyabasa melalui penyesuaian (*inpassing*). Inovasi yang dilakukan dalam mendukung penyesuaian jabatan tersebut adalah melalui pengembangan menu pada aplikasi GESIT untuk keperluan seleksi administrasi dan uji kompetensi.

Tujuan aktivitas prioritas ini adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai teknis bidang kebahasaan dan kesastraan serta penataan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi di setiap satker di lingkungan Badan Bahasa.

Berikut dasar hukum penunjang Jabatan Fungsional widyabasa.

<b>1</b> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa	<b>2</b> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa	<b>3</b> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKJ.35 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa	<b>4</b> Keputusan Kepala Badan Nomor 0509/1.11/HK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa Melalui Penyesuaian
--	---	---	--

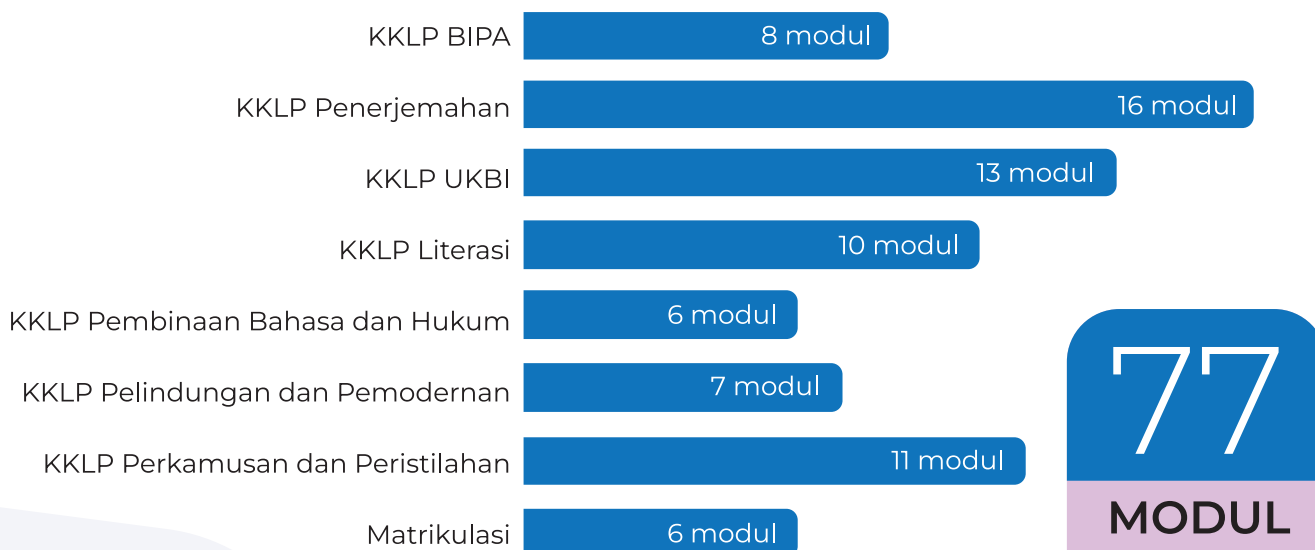
### 2. Penyusunan Modul Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

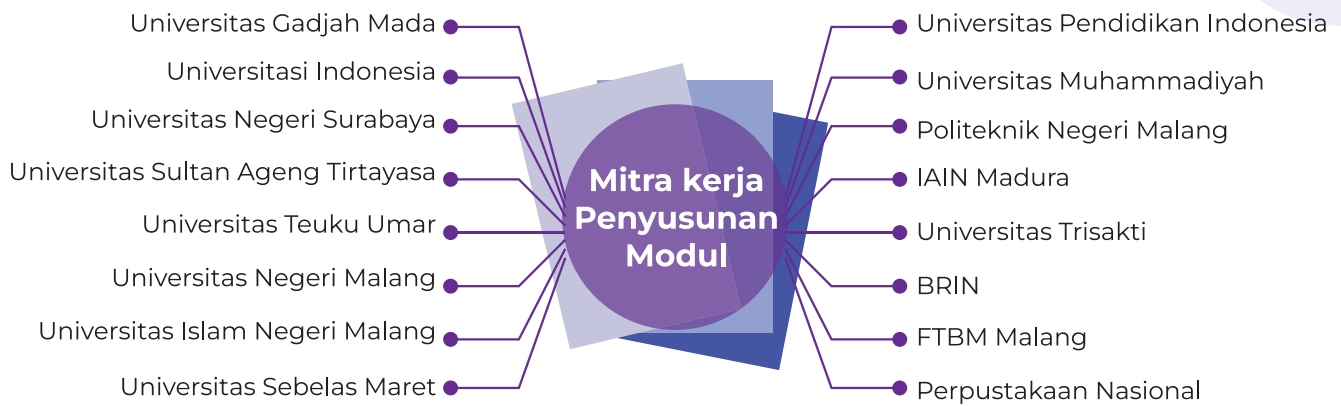
Pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggunakan strategi pola kerja melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP).



Peningkatan kompetensi anggota KKLP yang telah berjalan yaitu dalam bentuk bimbingan teknis dengan mengundang seluruh anggota KKLP dalam satu forum kegiatan luring sebanyak 245 orang. Namun, berdasarkan analisis Kepala Badan hal itu tidak efisien sehingga perlu terobosan baru. Oleh karena itu, pada awal tahun 2023 Kepala Badan memberikan arah kebijakan terkait peningkatan kompetensi anggota KKLP yaitu berbasis learning management system (LMS). Pola peningkatan kompetensi berbasis LMS memerlukan modul pembelajaran yang nantinya akan dimasukkan ke dalam LMS tersebut. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh KKLP dan para pakar, perlu disusun sebanyak 295 modul pelatihan untuk semua jenjang KKLP.

Tujuan penyusunan modul KKLP adalah menyiapkan modul pelatihan dan video pembelajaran untuk dimasukkan ke dalam LMS (learning Management System) WKMB (Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB)). WKMB merupakan strategi pengembangan kompetensi Pegawai ASN di lingkungan Kemendikbudristek dengan pengintegrasian seluruh sumber daya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan pengetahuan, kecakapan, dan sikap setiap individu dalam ekosistem “Merdeka Belajar” untuk mewujudkan SDM unggul yang memiliki kapabilitas tinggi. Penyusunan Modul KKLP tahun 2023 ditargetkan sebanyak 77 modul, yaitu.





### 3. Penyusunan Soal PPPK Widyabasa

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, instansi pembina jabatan fungsional widyabasa adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dalam hal ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan seleksi penerimaan PPPK yang salah satunya adalah JF Widyabasa. Seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Penyusunan instrumen alat uji untuk seleksi kompetensi teknis merupakan tanggung jawab instansi pembina yang dalam hal ini adalah Badan Bahasa.

Tujuan penyusunan soal PPPK ini adalah menyusun instrumen alat uji berupa soal pilihan ganda yang akan digunakan untuk seleksi penerimaan PPPK sesuai dengan standar kompetensi widyabasa. Dengan demikian widyabasa yang lulus uji kompetensi diharapkan telah memenuhi standar kompetensi.

Pada tahun 2023, Badan Bahasa menyusun sebanyak 450 soal pilihan ganda untuk jabatan fungsional widyabasa ahli pertama. Soal yang telah disusun diserahkan ke Biro SDM Kemendikbudristek dan dimasukkan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara. Tahap berikutnya masih diperlukan penyusunan soal PPPK Widyabasa untuk jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Soal-soal tersebut akan dimanfaatkan oleh instansi pengguna baik instansi pusat maupun pemerintah daerah.

### 4. Kerja sama

#### Skala Internasional

##### a. Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim)

Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (Mabbim) Indonesia menggelar Sidang Eksekutif ke-59 Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang dihadiri oleh ketua dan anggota perwakilan Mabbim Malaysia dan Brunei Darussalam serta



dipimpin oleh delegasi Mabbim Indonesia selaku tuan rumah. Majelis ini digelar kembali setelah terhenti selama tiga tahun karena pandemi Covid-19. Kerja sama yang difasilitasi oleh Sekretariat Badan Bahasa tersebut dilaksanakan untuk merespons dinamika perkembangan zaman yang begitu cepat dan membutuhkan lahirnya berbagai ide dalam pengembangan di bidang kebahasaan.



## Kesepakatan Antarnegara

### Sidang Eksekutif ke-59 Mabbim

- 1) tata kerja Mabbim;
- 2) pengakhiran Sidang Pakar dan Sidang Eksekutif;
- 3) pelaksanaan Sidang Eksekutif ke-59 Mabbim juga merupakan Forum Ketua Mabbim yang pertama;
- 4) pelaksanaan Musyawarah/Mesyuarat Sekretariat pertama di Brunei Darussalam pada tahun 2024;
- 5) pelaksanaan Forum Ketua Mabbim selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2025; serta
- 6) hal-hal lain yang bertentangan dengan hasil keputusan Sidang Eksekutif ke-58 yang dianggap tidak berlaku.



Rampak Serantau Edisi Ke-27 (2021) dan Edisi Ke-28 (2022)



Buletin Mabbim Vol. 12, Tahun 2021

Dalam sidang eksekutif ke-32 Mabbim tahun 1993 di Bogor, diputuskan untuk menerbitkan (secara bergilir) sebuah jurnal berkala yang dinamai Rampak Serantau. Tujuan dari penerbitan jurnal ini adalah untuk memasyarakatkan karya ilmiah berupa tinjauan maupun dari hasil penelitian di berbagai bidang di ketiga negara anggota. Makalah yang dimuat dalam Rampak Serantau berasal dari masing-masing tujuh orang penulis dari setiap negara anggota Mabbim. Kolaborasi penerbitan jurnal ini diterbitkan secara bergilir, di tahun 2021 Indonesia mendapat kesempatan untuk menerbitkan Rampak Serantau Edisi ke-27. Selanjutnya, tahun 2022, Rampak Serantau diterbitkan oleh Mabbim Brunei Darussalam, dan tahun 2023, Rampak Serantau diterbitkan oleh Mabbim Malaysia dengan jumlah penulis 21 orang (berasal dari tiga negara). Kolaborasi lainnya yang dilaksanakan dalam aktivitas prioritas ini adalah Buletin Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), atau Buletin Mabbim Edisi ke-13 ini



diterbitkan pada tahun 2022. Mabbim merupakan kerja sama kebahasaan yang berperan penting dalam program pengembangan bahasa di ketiga negara anggotanya. Setiap kegiatan terkait dengan Mabbim kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan dalam sebuah lembar publikasi bernama Buletin Mabbim. Buletin ini merupakan majalah tahunan seputar Mabbim yang diterbitkan khusus oleh Indonesia.

### b. Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera)



Sekretariat Badan Bahasa memberikan kesempatan kepada para sastrawan muda dari tiga negara anggota yang hadir yakni Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia serta negara pemerhati Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) untuk memperluas wawasan dan kemampuan teknis penulisannya melalui. Program Penulisan Mastera telah dilaksanakan sejak tahun 1997 dengan berbagai genre, yaitu genre cerpen, esai, drama, dan novel. Program Mastera vakum pada tahun 2020—2022 akibat adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2023, Mastera diadakan kembali dengan tema Naskah Drama. Melalui Mastera tahun 2023, turut dilaksanakan Penghargaan kepada 4 orang Sastrawan Muda, bertujuan untuk memotivasi kreativitas dan peningkatan mutu karya

sastra berbahasa Indonesia/Melayu di kawasan Asia Tenggara. Penghargaan Sastrawan Muda Mastera semula ditujukan untuk alumni peserta Program Penulisan Mastera (puisi, cerpen, drama, dan esai) yang dilaksanakan oleh Mastera Indonesia sejak tahun 2005 lalu. Kini penghargaan itu diperluas sasarannya, yaitu sastrawan muda di semua negara anggota Mastera.

### Skala Nasional

Fasilitasi kerja sama antarlembaga ini merupakan basis data dokumen koordinasi dan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Fasilitasi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan yang ingin melaksanakan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun 2022—2023 ini, Sekretariat Badan telah melaksanakan kerja sama dengan 62 Perguruan tinggi, lembaga, serta Pemerintah daerah. Dengan kerja sama ini, diharapkan semakin banyak mitra yang melaksanakan tugas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra. Berikut beberapa kerja sama yang telah dilakukan.



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## PETA CAPAIAN KERJA SAMA 2022-2023

Total: 60 PKS



### a. Kerja Sama Perguruan Tinggi

- 1) Universitas Bung Hatta,
- 2) Sumatera Barat,
- 3) Universitas Hamzanwadi,
- 4) Nusa Tenggara Barat, dsb.

### b. Kerja Sama Pemerintah Daerah

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
- 2) Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dsb.

### c. Kerja Sama Komunitas

- 1) Malam Sastra,
- 2) Membaca Raden Saleh, dsb.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan satu sasaran kegiatan dengan dua indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2023.

#### Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Secara umum, kualitas tata kelola diseluruh satuan kerja di Badan bahasa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin baiknya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga berdampak pada capaian kinerja yang optimal, lebih dari yang di targetkan. Optimalisasi sumber daya ini berdampak baik dengan ditandai perolehan predikat SAKIP minimal BB di seluruh satker, dan satuan kerja yang diusulkan mendapatkan predikat ZI WBK terdapat 9 satuan kerja pada tahun 2023. Hal ini merupakan upaya bersama seluruh satuan kerja di Badan Bahasa yang berkomitmen untuk mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang berkualitas.



# Dampak perubahan budaya kerja



1\* penyederhanaan sistem kerja dari sepuluh layanan menjadi empat tim kerja;

2 pemantauan pelaksanaan program dan anggaran dilakukan secara rutin sehingga capaian kinerja dapat terkendali dengan baik;

3\*\* peningkatan kedisiplinan pegawai ditandai dengan menurunnya hukuman disiplin pegawai; dan

4\*\* tren penurunan hasil temuan BPK tahun 2023 di lingkungan BPP Bahasa.

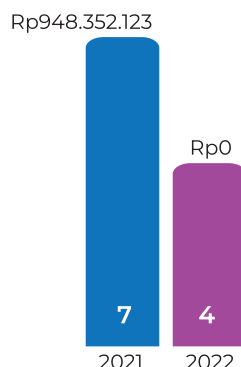
## \*Penyederhanaan Sistem Kerja

1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran, dan Data dan Informasi
2	Layanan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	2	Tim Kerja Kerja Sama, Humas, Publikasi, dan Umum
3	Layanan Data dan Informasi	3	Tim Kerja Keuangan, Perbendaharaan, APK, dan BMN
4	Layanan Kerja Sama	4	Tim Kerja Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian
5	Layanan Humas dan Publikasi		
6	Layanan Umum		
7	Layanan Keuangan dan Perbendaharaan		
8	Layanan APK		
9	Layanan BMN		
10	Layanan Hukum dan Tata Laksana		
11	Layanan Kepegawaian		

## Peningkatan Disiplin Pegawai



Hukuman Disiplin



Temuan



Tindak Lanjut

## \*\*\*Penurunan Temuan BPK

Saldo 2021  
Rp126.000.000  
86,71%

Saldo 2022  
Rp0  
100%

Berikut penjelasan ketercapaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



**IKK 1.1.****Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB**

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “BB” adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “BB”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan dan penerapan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70–80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel. Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai Sakip} = \begin{matrix} 30\% \\ \text{Perencanaan Kinerja} \end{matrix} + \begin{matrix} 30\% \\ \text{Pengukuran Kinerja} \end{matrix} + \begin{matrix} 15\% \\ \text{Pelaporan Kinerja} \end{matrix} + \begin{matrix} 25\% \\ \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \end{matrix}$$

Berikut metode penghitungan ketercapaian indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Badan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP-nya minimal BB.

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP-nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker BPP Bahasa}} \times 100\%$$

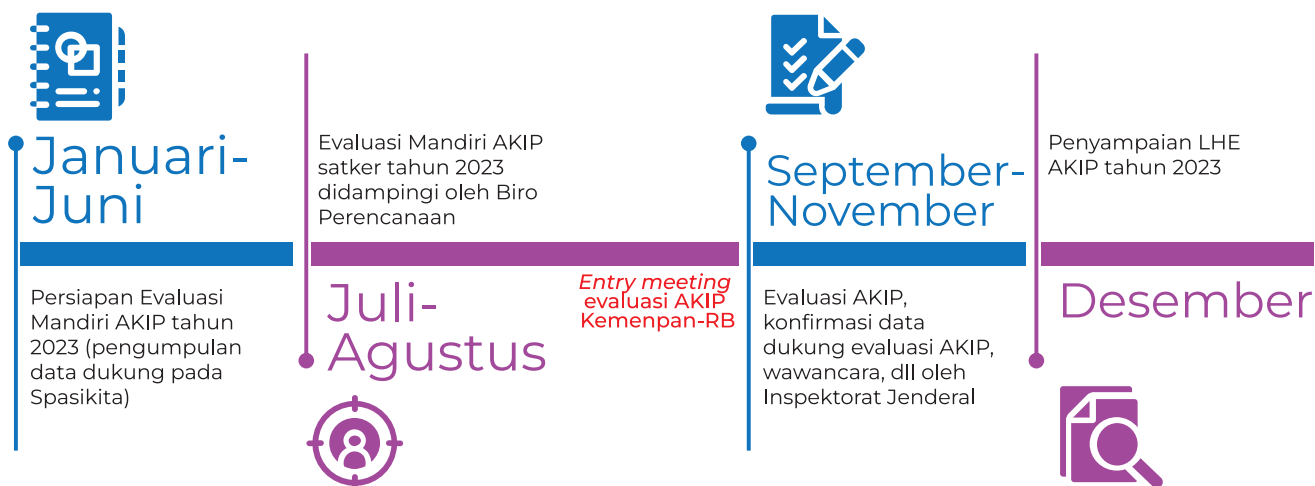
Tabel 1. Tabel Sandingan Capaian dan Target IKK SAKIP 2022--2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024	
		Target	Capaian		Target	Capaian	%	Target	%
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,7	75,5	100	132,45%	78,8	100	126,90	81,80	122,25

Capaian tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 81,80 sudah melampaui sebesar 122,25%. Hal ini terlihat pada tabel tersebut di atas. Tahun 2023, dari total 34 satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebanyak 33 satker memperoleh predikat A dan satu satker memperoleh predikat BB, yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Hal ini karena Pustanda merupakan satker baru, sehingga pada saat dilakukan evaluasi AKIP, belum memiliki kelengkapan dokumen pembandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai hasil evaluasi AKIP seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa tidak terlepas dari peran Sekretariat Badan Bahasa, baik sebagai satker mandiri, maupun sebagai satker yang memiliki fungsi koordinasi urusan ketatausahaan di seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Sekretariat Badan bahasa melakukan upaya koordinasi untuk penguatan SAKIP di setiap satker, mengawal satker pendampingan, sampai dengan tahap finalisasi evaluasi AKIP pada saat melakukan masa sanggah dengan tim Inspektorat Jenderal. Dalam melakukan persiapan pengumpulan data dukung dan evaluasi hasil penilaian mandiri AKIP, seluruh satker BPP Bahasa turut didampingi oleh tim Akuntabilitas Kinerja dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Upaya-upaya ini dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sesuai dengan peraturan perundangan, petunjuk teknis, dan pedoman evaluasi AKIP satker.

Berikut merupakan linimasa evaluasi AKIP di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2023.



Berikut nilai SAKIP seluruh satker di BPP Bahasa tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2. Nilai Sakip Seluruh Satker tahun 2022--2023

No	Nama Satker	Nilai Tahun 2022	Predikat Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Predikat tahun 2023
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	90,00	A	90,30	AA
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	90,00	A	90,00	A
3	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	81,85	A	90,00	A
4	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	81,90	A	90,00	A
5	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	89,25	A	90,00	A

No	Nama Satker	Nilai Tahun 2022	Predikat Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Predikat tahun 2023
6	Balai Bahasa Provinsi Bali	88,05	A	89,25	A
7	Balai Bahasa Provinsi Aceh	86,55	A	89,15	A
8	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	85,00	A	89,10	A
9	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	88,30	A	89,05	A
10	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	88,50	A	89,00	A
11	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	84,25	A	88,90	A
12	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88,00	A	88,35	A
13	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	87,10	A	88,15	A
14	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	87,45	A	88,05	A
15	Balai Bahasa Provinsi Papua	85,00	A	87,60	A
16	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	82,90	A	87,25	A
17	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	84,70	A	87,15	A
18	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	82,65	A	86,85	A
19	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	84,70	A	86,25	A
20	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	84,30	A	86,10	A
21	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	85,15	A	86,00	A
22	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	84,10	A	85,50	A
23	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	84,70	A	85,50	A
24	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	80,15	A	85,30	A
25	Kantor Bahasa Provinsi Banten	84,10	A	85,15	A
26	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	82,60	A	84,70	A
27	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	83,10	A	84,10	A
28	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	83,20	A	83,70	A
29	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	82,60	A	83,65	A
30	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	82,00	A	83,20	A
31	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	80,50	A	83,10	A
32	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	84,90	A	82,40	A
33	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	82,75	A	81,40	A
34	Balai Bahasa Provinsi Riau	81,70	A	80,95	A
35	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	0,00	-	74,05	BB

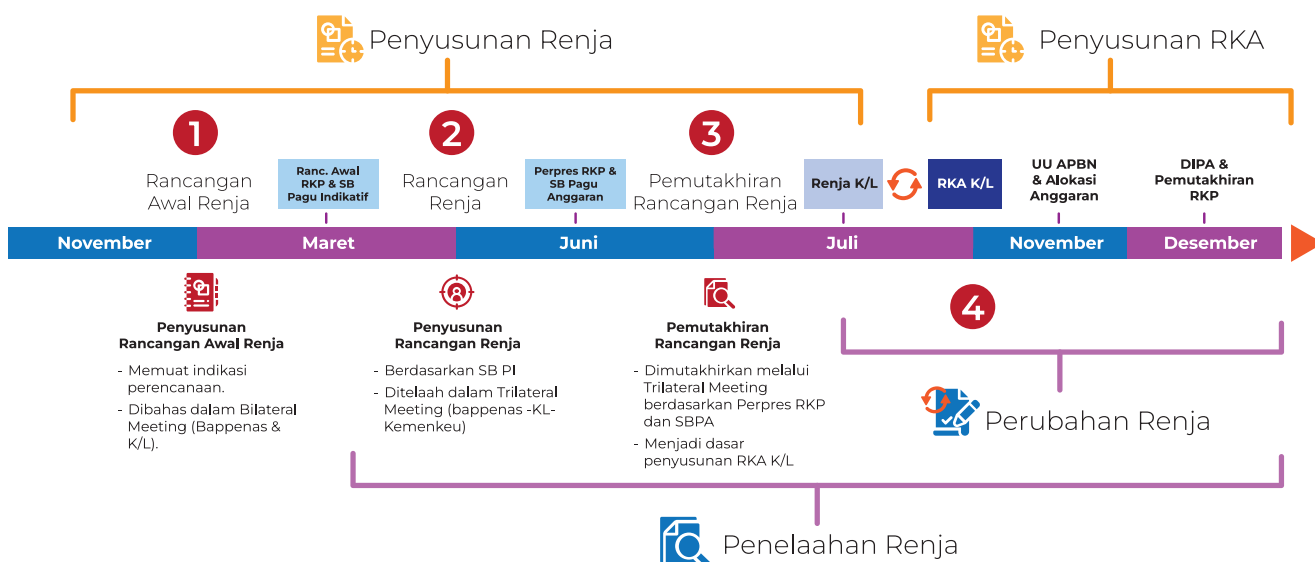


Untuk nilai SAKIP Sekretariat sendiri selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2022 dan 2023, berhasil dipertahankan di angka 90 atau dengan predikat A. Grafik disamping adalah nilai evaluasi AKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Di tahun 2022 dan tahun 2023 nilai hasil evaluasi AKIP berada di angka yang sama, yaitu 90 dengan predikat A. Hasil nilai ini tidak terlepas dari komitmen kepala satker dan upaya tim SAKIP Sekretariat Badan Bahasa serta seluruh

pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa dalam mewujudkan sistem pemerintah yang akuntabel.

Berikut kegiatan yang mendukung keberhasilan ketercapaian indikator kinerja tersebut di atas.

### a. Program dan Anggaran



Aktivitas di tim perencanaan dalam mendukung ketercapaian target indikator SAKIP tahun 2023 yaitu, mengoordinasi penyusunan program dan anggaran sesuai dengan siklus perencanaan, seperti melaksanakan penyusunan rencana kerja (renja), penyusunan pagu indikatif, dan penyusunan pagu anggaran. Upaya penelaahan dokumen anggaran yang diajukan di tiap tahap siklus tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kesesuaian program dan anggaran terhadap dokumen renstra. Dalam melakukan aktivitas tersebut, tim perencanaan melakukan kolaborasi dengan seluruh tim di Sekretariat Badan Bahasa, layanan KKLP, dan mitra kerja baik internal maupun eksternal yang memiliki keterkaitan fungsi untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran. Pelibatan dilaksanakan bersama dengan Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, unit utama lainnya di lingkungan Kemendikbud, kolaborasi mitra kerja eksternal seperti dengan Bappenas, DJA, Kemenko PMK, Komisi X DPR-RI, LPDP, PUPR, Pemda setempat, dan juga BPS.

#### AKTIVITAS PENDUKUNG KETERCAPAIAN PREDIKAT SAKIP

Peningkatan dan penajaman tiga Program Prioritas Badan Bahasa

Penyusunan dan perumusan RPJMN tahun 2025—2029

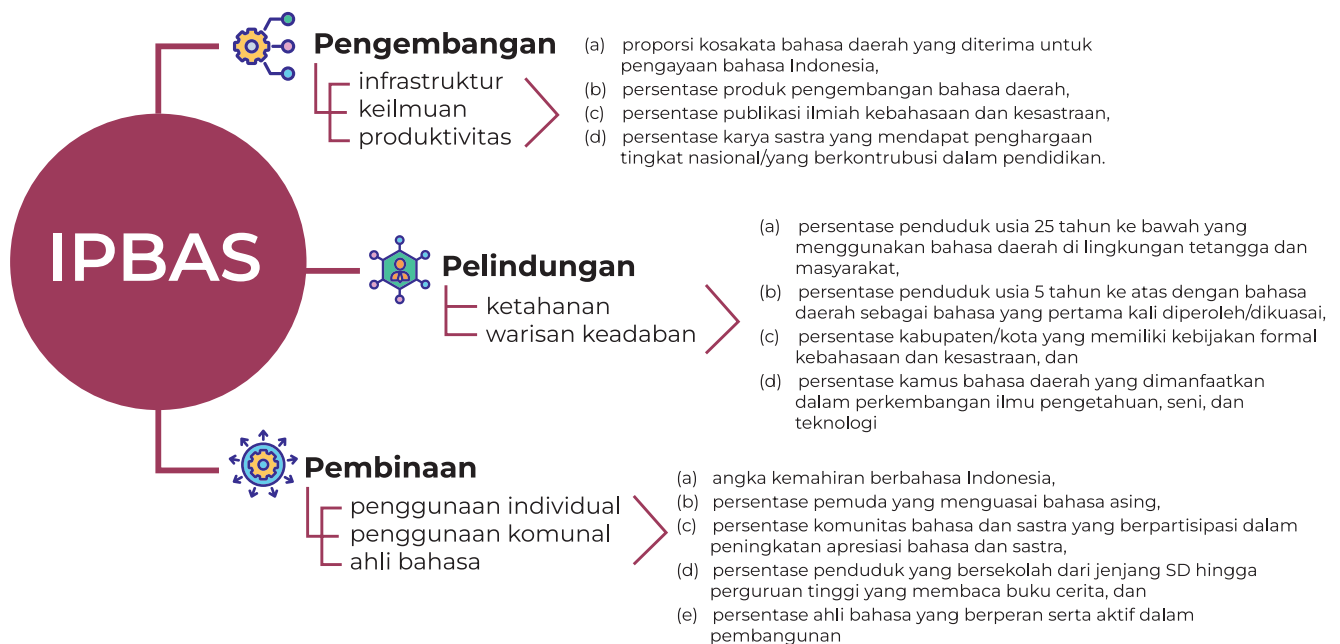
Rencana Strategis Badan Bahasa tahun 2025—2029 terkait Pemutakhiran Rincian Output di tahun 2025

inisiasi penyusunan Indeks Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan (IPBas).



Rapat Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan

Inisiasi penyusunan IPBAS merupakan instrumen dan basis formulasi kebijakan bidang kebahasaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebahasaan dan kesastraan tingkat nasional dan provinsi.



Seluruh aktivitas ini yang akan menjadi dokumen dasar perencanaan program dan anggaran, oleh seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran



Layanan evaluasi dalam mendukung ketercapaian target indikator persentase satker yang memiliki predikat SAKIP minimal BB tahun 2023, aktivitas yang dilakukan yaitu, melaksanakan koordinasi pendampingan penyusunan laporan



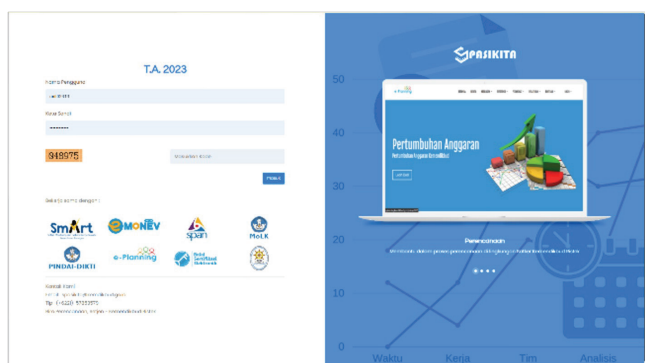
kinerja (Lakin), mengimplementasikan manajemen risiko, evaluasi program dan anggaran secara berkala baik bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan, melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja anggaran, evaluasi dan reviu Renstra BPP Bahasa tahun 2023, dan mengkoordinasi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Bahasa. Seluruh output hasil kegiatan tersebut mendukung komponen-komponen penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Kegiatan Penyusunan Lakin Eselon I

lingkungan BPP Bahasa. Lakin disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Renstra Satker. Data dukung lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan Lakin adalah data hasil reviu Renstra tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada bulan Juni-Juli tahun 2023.

Penyusunan Lakin dibagi menjadi dua jenis aktivitas, yaitu penyusunan Lakin Eselon I dan Penyusunan Lakin Eselon II. Tim evaluasi mengakomodasi dan melakukan sinkronisasi data capaian kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi anggaran di tahun berjalan seluruh indikator yang menjadi tujuan dan sasaran seluruh satker di



Seluruh aktivitas tersebut diakomodasi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Tim Biro Perencanaan, yaitu Spasikita. Untuk fitur reviu renstra pada aplikasi Spasikita, saat ini masih dalam proses pengembangan oleh operator IT di Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek.

Selain itu, layanan evaluasi dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan melalui metode daring setiap bulan dan triwulan berdasarkan kelompok pendampingan dalam rangka melakukan sinkronisasi lembar III DIPA seluruh satker agar agregat target konsistensi RPD Badan Bahasa tercapai optimal.

PMK 62 tahun 2023

$$\text{Bobot NKA} = \begin{matrix} 50\% \\ \text{EKA} \end{matrix} + \begin{matrix} 50\% \\ \text{IKPA} \end{matrix}$$

penghitungan, dengan rincian nilai yang dapat dilihat pada aplikasi OmSPAN. Monitoring dan evaluasi melalui kedua aplikasi ini diupayakan dengan berkolaborasi bersama tim keuangan dan perbendaharaan, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan agar target nilai kinerja anggaran setiap satker di lingkungan BPP Bahasa dapat tercapai.

Nilai EKA dihitung berdasarkan enam komponen penghitungan, dan dapat dilihat melalui aplikasi SMART DJA. Sedangkan nilai IKPA dihitung berdasarkan delapan komponen

Dalam mengantisipasi risiko pelaksanaan program dan anggaran yang terjadi, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan penilaian risiko (mitigasi risiko) untuk setiap tingkatan, baik tingkat unit kerja maupun kegiatan. Format penyampaian mitigasi risiko dilaksanakan setiap triwulan dengan metode pengumpulan data secara daring seluruh satker dan bersemuka dengan tim manajemen risiko Sekretariat.

Seluruh upaya-upaya yang dilaksanakan tersebut di atas, merupakan beberapa kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator Persentase satker di BPP Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB. Berikut linimasa yang dilaksanakan oleh tim SAKIP Sekretariat Badan dalam melakukan koordinasi ke seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa sebagai berikut dalam mendukung ketercapaian indikator tersebut.

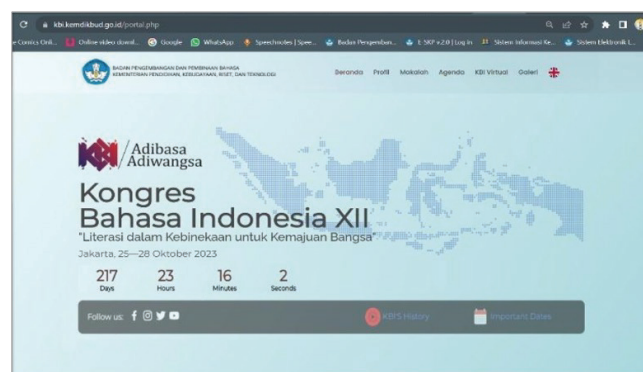
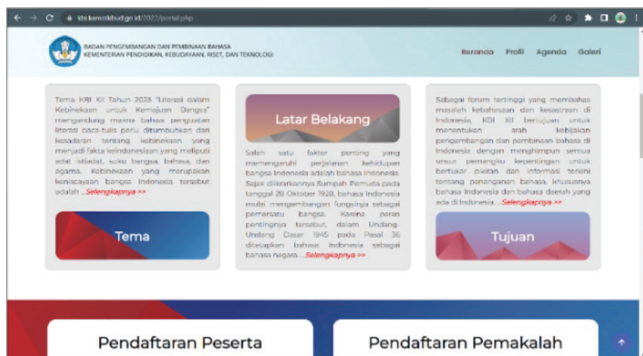


### c. Data dan Informasi



Pada tahun 2023, layanan pengembangan sistem informasi fokus prioritas layanan pada aktivitas pengembangan Laman GESIT (Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu) yaitu pada pengembangan di fitur Widyabasa, Laman KBI (Kongres Bahasa Indonesia), dan Laman di lingkungan Sekretariat dalam hal ini dilakukan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian seluruh pimpinan dan staf dalam menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat secara umum, maupun seluruh karyawan di lingkungan Badan Bahasa secara khusus melalui aplikasi daring. Pengembangan Laman Widyabasa ini diutamakan pada pengembangan

fitur layanan terkait widyabasa, antara lain, pembuatan modul website publik widyabasa, pembuatan modul backend widyabasa, pembuatan modul backend admin widyabasa, pembuatan modul registrasi widyabasa, pembuatan pangkalan data (database), manajemen data dan pengaturan. Pengembangan laman KBI Badan Bahasa pada tahun 2023 adalah membuat desain tampilan, sistem CMS (*Content Management System*), sistem server yang menggunakan sistem awan (*cloud system*) *On-premise* Pusdatin Kemendikbudristek, dan sistem basis data. Penerapan SMKI pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tahun 2023 dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian seluruh pimpinan dan staf dalam menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat melalui aplikasi daring.



#### d. Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Kerja Sama

Melalui layanan humas dan publikasi di Sekretariat Badan Bahasa dilaksanakan fasilitasi Press Tour sebagai upaya penyebarluasan informasi perihal kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Bahasa, dan Taklimat Media dengan berkoordinasi bersama Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemendikbudristek melalui Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) yang dibina oleh BKHM. Press Tour diikuti oleh beberapa media nasional di Jakarta, yang ikut turun ke lapangan untuk meliput pemberitaan perihal Kebahasaan dan Kesastraan di lingkungan Badan Bahasa, misalnya, Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi, serta Bantuan Pemerintah di bidang kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra. Sedangkan dalam Taklimat Media, pimpinan Badan Bahasa hadir untuk menyampaikan paparan perihal capaian/produk/layanan di lingkungan Badan Bahasa yang dimuat di media massa cetak atau digital.

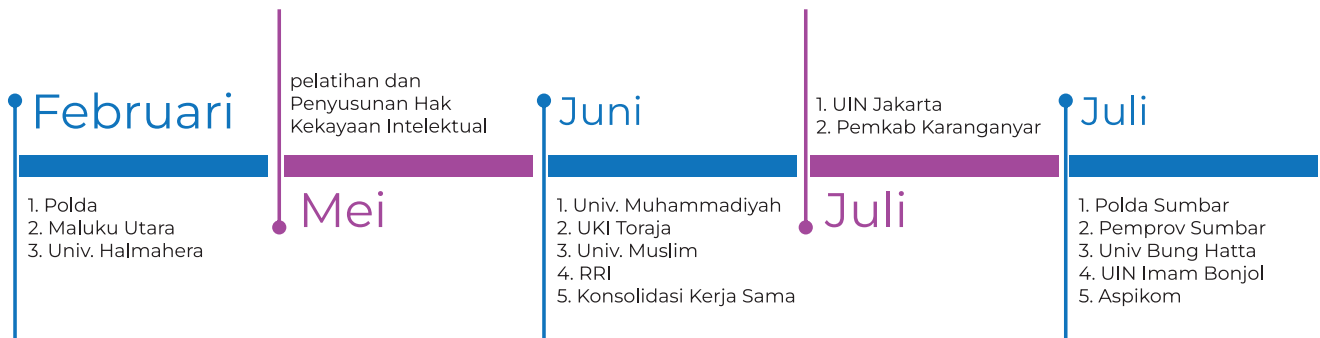
Dalam menunjang ketercapaian indikator kinerja kegiatan, publikasi dokumen-dokumen data dukung SAKIP di laman Badan Bahasa dipublikasikan oleh tim humas dan publikasi dengan berkoordinasi bersama tim data dan informasi sebagai pengembang laman Badan Bahasa. Sehingga linimasa pelaksanaan publikasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyesuaikan dari





Press Tour Kongres Bahasa Indonesia XII

hasil pelaksanaan kegiatan seluruh satker yang akan dipublikasikan, baik melalui laman maupun media sosial Badan Bahasa, maupun media cetak mitra kerja Badan Bahasa.



Kerja sama Badan Bahasa dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Dukungan lainnya yang dilakukan adalah melalui aktivitas kerja sama dengan kementerian/perguruan tinggi/ lembaga lainnya. Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Daerah juga mendukung pelaksanaan program kegiatan yang ada di Balai/Kantor Bahasa, seperti sosialisasi UKBI bagi guru dan tenaga pendidikan SMA/SMU

sederajat dan ASN di lingkungan pemerintah daerah, revitalisasi bahasa daerah, festival sastra, serta pelibatan dalam penyusunan Perda dan produk hukum daerah. Tahun ini Badan Bahasa juga telah bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI. Sebelumnya kerja sama penyiaran program di RRI bersifat berbayar, namun setelah adanya perjanjian kerja sama, Balai/Kantor Bahasa mendapat kesempatan siaran dan publikasi di RRI daerah tanpa dipungut biaya.

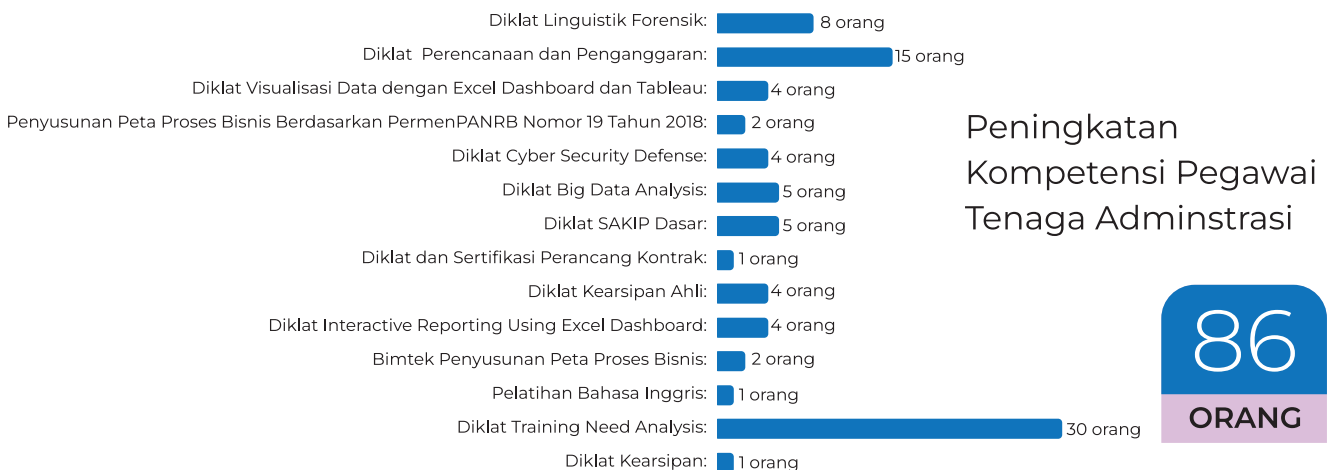
## e. Kepegawaian



Penyusunan Modul KKLP

Melalui tim kepegawaian Sekretariat Badan Bahasa, dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja, aktivitas yang dilaksanakan yaitu, pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat pada khususnya, melaksanakan reward kepada pegawai berprestasi yang terpilih melalui aplikasi GESIT, peningkatan jenjang jabatan semula pelaksana menjadi jabatan fungsional tertentu (promosi dan mutasi), penyusunan 80 modul

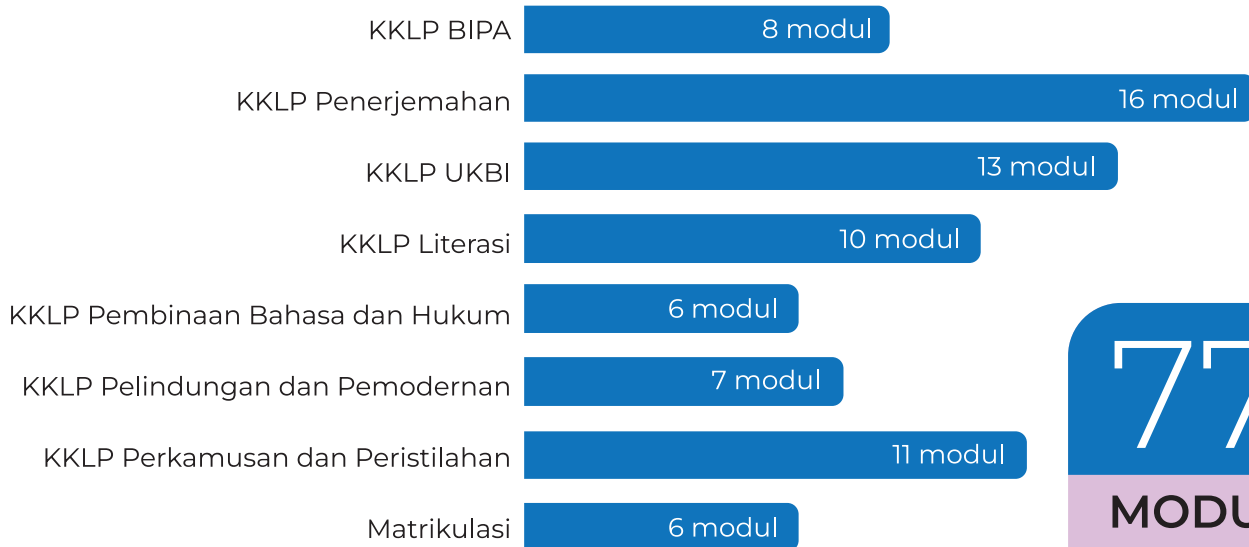
KKLP jenjang pertama, dan Mancakrida sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa. Berikut rekapitulasi peningkatan kompetensi Kelompok Kepakaran Layanan dan Profesional pegawai di lingkungan BPP Bahasa yang telah dilaksanakan oleh layanan SDM.



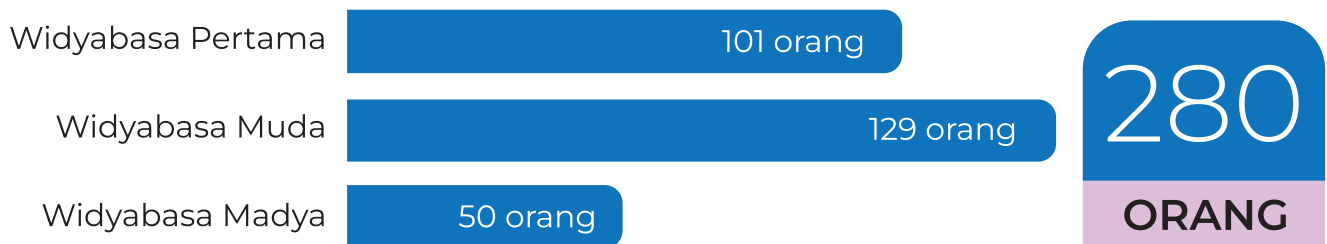
### Peningkatan Kompetensi KKLP



## Penyusunan Modul KKLP



## Pelantikan Jabatan Fungsional Widyabasa



Pelantikan  
Jabatan Fungsional  
Lainnya

Seluruh tim di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa berupaya bersama-sama dalam mendukung ketercapaian target Persentase Satker yang Mendapatkan Predikat SAKIP Minimal BB di lingkungan Badan Bahasa. Tim SDM yang mendukung dari segi dokumentasi pemberian reward and punishment, penguatan SAKIP oleh tim evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dokumen perencanaan oleh tim perencanaan dan penganggaran, maupun data-data dukung dokumen SAKIP lainnya oleh tim data dan informasi, serta publikasi dokumen SAKIP oleh tim publikasi dan kehumasan. Dukungan dari tim kerja sama dalam mengakomodasi kolaborasi antar kementerian/lembaga juga turut berkontribusi dalam pemenuhan dokumen data dukung SAKIP.

Sehingga secara umum, Sekretariat Badan Bahasa dalam mencapai target indikator sebagai satker mandiri dan satker yang memiliki fungsi koordinasi, memiliki kendala seperti beberapa tim SAKIP yang belum memiliki sertifikat SAKIP. Hal ini juga menjadi catatan khusus tim evaluator dari Inspektorat Jenderal. Seluruh tim SAKIP wajib memiliki sertifikat pelatihan SAKIP terutama untuk pimpinan satker. Sehingga strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Badan Bahasa adalah memfasilitasi seluruh tim SAKIP di lingkungan Badan Bahasa untuk mengikuti pelatihan SAKIP yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan melalui Pusat Pendidikan Pelatihan Kemendikbudristek.

No.	Kendala	Strategi	Langkah Antisipasi
1.	Perbedaan perspektif evaluator terkait dengan penilaian evaluasi AKIP satuan kerja.	Sekretariat Badan Bahasa memfasilitasi seluruh satker untuk berkoordinasi dengan tim evaluator.	Tim evaluasi Sekretariat Badan menginisiasi pertemuan awal dengan tim evaluator yang difasilitasi oleh tim biro perencanaan untuk menyamakan persepsi
2.	Belum semua pimpinan dan pegawai berkomitmen dan memahami dalam mengimplementasikan SAKIP.	Melakukan sosialisasi dan penguatan kembali terkait implementasi SAKIP.	Memfasilitasi pendampingan awal penyiapan dokumen data dukung SAKIP seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa.

## IKK 1.2.

### Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM

Berdasarkan definisi operasional Renstra Kemendikbudristek tahun 2022—2024, definisi target Jumlah Satker di Badan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT. Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik. Metode penghitungan yang digunakan adalah Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I.



Tabel 3. Tabel Sandingan Capaian dan Target IKK 2022--2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024	
		Target	Capaian		Target	Capaian	%	Target	%
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM"	5	5	9	180%	5	9	180	5	180

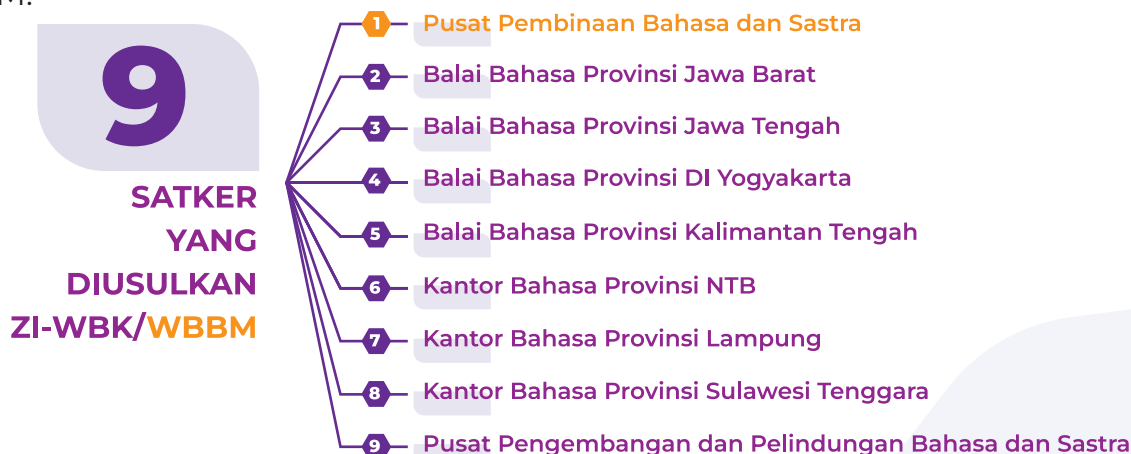
Capaian di tahun 2023 sebesar 9 satker yang diusulkan mendapatkan ZI-WBK/WBBM sudah melampaui dari target akhir Renstra sebanyak 5 satker, yaitu sebesar 180%.

Di tahun 2023, berdasarkan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tim Reformasi Birokrasi



Pendampingan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat saat wawancara dengan Tim Penilai Nasional (asesor Kemendikbud)

Sekretariat Badan Bahasa melakukan pendampingan pada tiap satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Pendampingan dilakukan bersama dengan tim dari Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat Jenderal selaku TPI Kemendikbudristek (Tim Penilai Internal, asessor Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek). Dalam pengisian LKE dan pelaksanaan survei eksternal terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), Biro Organisasi dan Tata Laksana menggunakan aplikasi SIAZIK. Kedua hal ini merupakan bagian penilaian ZIWBK/WBBM yang telah dilakukan tiap satker yang diusulkan. Sementara itu TPI telah melakukan pendampingan langsung kesembilan satuan kerja dan memberikan masukan terkait data ataupun sarana dan prasarana yang harus dipenuhi tiap satker. Tahap selanjutnya yang dilakukan Tim RB Badan Bahasa bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Itjen adalah mendampingi setiap satker agar lebih siap dalam penilaian tahun 2023 dan semua satuan kerja diharapkan berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.



Hasil akhir setelah dilakukan pendampingan bersama oleh Tim RB Badan Bahasa, Biro Ortala dan Inspektorat Jenderal selaku TPI, sembilan satker tersebut dinyatakan lolos seleksi dari TPI, baik sebagai satker dengan predikat ZI-WBBK maupun satker dengan predikat ZI-WBBM di lingkungan Kemendikbudristek.

Upaya pendampingan secara berkala dilakukan oleh tim RB Sekretariat Badan Bahasa baik secara daring maupun bersemuka dengan tim RB di satker. Hal ini tidak terlepas dari target akhir indikator ini yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Berikut hasil analisis ketercapaian setiap komponen yang mendukung indikator kinerja tersebut di atas.

#### a. Hukum Tata Laksana



Tim Hukum dan Tata Laksana dalam mendukung ketercapaian indikator melakukan upaya seperti mendampingi satker pra pengusulan ZI-WBK/WBBM, mengunggah dokumen data dukung ke aplikasi SIAZIK, sosialisasi dan reviu persiapan persentasi pembangunan ZI, serta melakukan patok banding dengan benchmark satker lainnya. Dukungan sarana dan prasarana dari tim umum, barang milik negara, serta catatan zero temuan dari tim APK, menjadi aktivitas pendukung satker yang diusulkan ZI-WBK/WBBM.

#### b. Umum (Sarana dan Prasarana)





Pemeliharaan gedung dan bangunan yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu renovasi panggung, ruang laktasi, ruang unit layanan terpadu, ruang kepala badan, tangga ke ruang kepala badan, ruang rapat di gedung Darma lantai tiga, parkir khusus disabilitas, lapangan olahraga bola voli, pembuatan kantin di rawamangun, penampung air (toren) di Sentul, ruang kepala Pusbanglin di Sentul, dan ruang kepala Pusbin di Sentul.



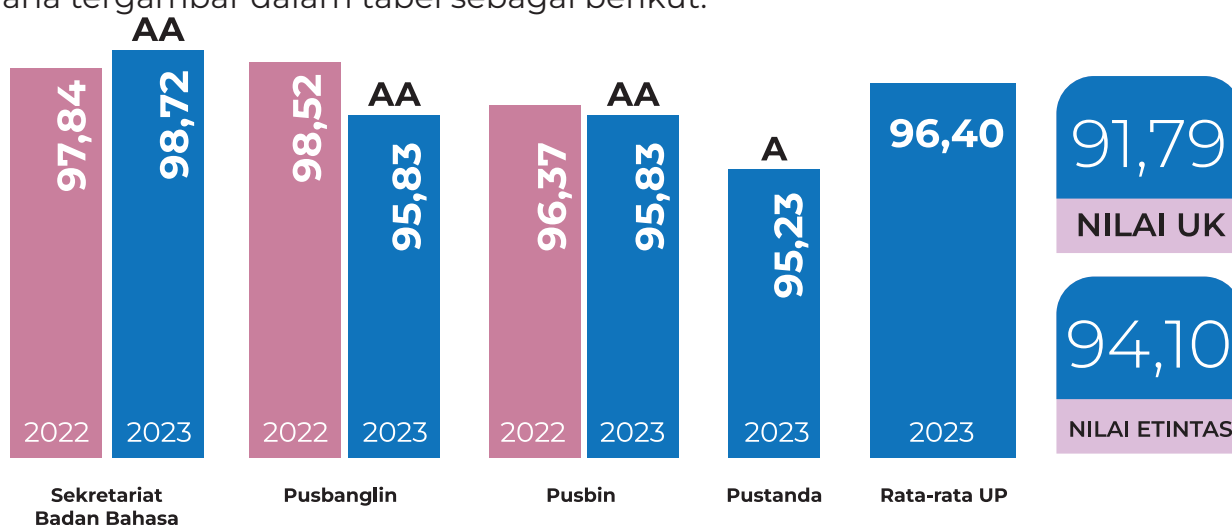


Renovasi Ruang Kepala Badan



Renovasi Ruang Kantin

Aktivitas lainnya yang mendukung ketercapaian indikator adalah pengelolaan kearsipan. Arsip yang dikelola merupakan upaya untuk melakukan pembenahan dan penataan Arsip Dinamis milik Badan Bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang ada. Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) tahun 2023, Badan Bahasa berada pada urutan ketiga pemilik nilai entitas tertinggi. Nilai entitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diperoleh dari hasil rata-rata nilai Unit Pengolah ditambah dengan nilai Unit Kearsipan dibagi dua, sebagai mana tergambar dalam tabel sebagai berikut.



Aktivitas lain yang serupa dalam mendukung pengelolaan kearsipan yaitu melakukan asistensi ke delapan balai dan kantor, yang berkolaborasi dengan tim persuratan.



Arsip Dinamis yang ada di Balai/Kantor Bahasa akan diberkaskan untuk arsip aktif dan penataan arsip inaktif. Sedangkan untuk penyelamatan informasi dari pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya dilakukan pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai guna dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan sebanyak 131 boks atau 877 berkas.

Tim layanan umum juga melakukan aktivitas layanan keprotokolan dengan memfasilitasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan seperti rapat Pimpinan, menyiapkan keperluan pimpinan, menyiapkan upacara bendera, dan melakukan koordinasi dengan keprotokolan Sekretariat Jenderal Kemendikburistek. Selain itu, tim layanan umum juga memfasilitasi beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kantor seperti peresmian gedung, malam sastra, acara keagamaan, dan peminjaman area kantor/ruang sidang yang digunakan oleh masyarakat umum.



Pengelolaan arsip inaktif

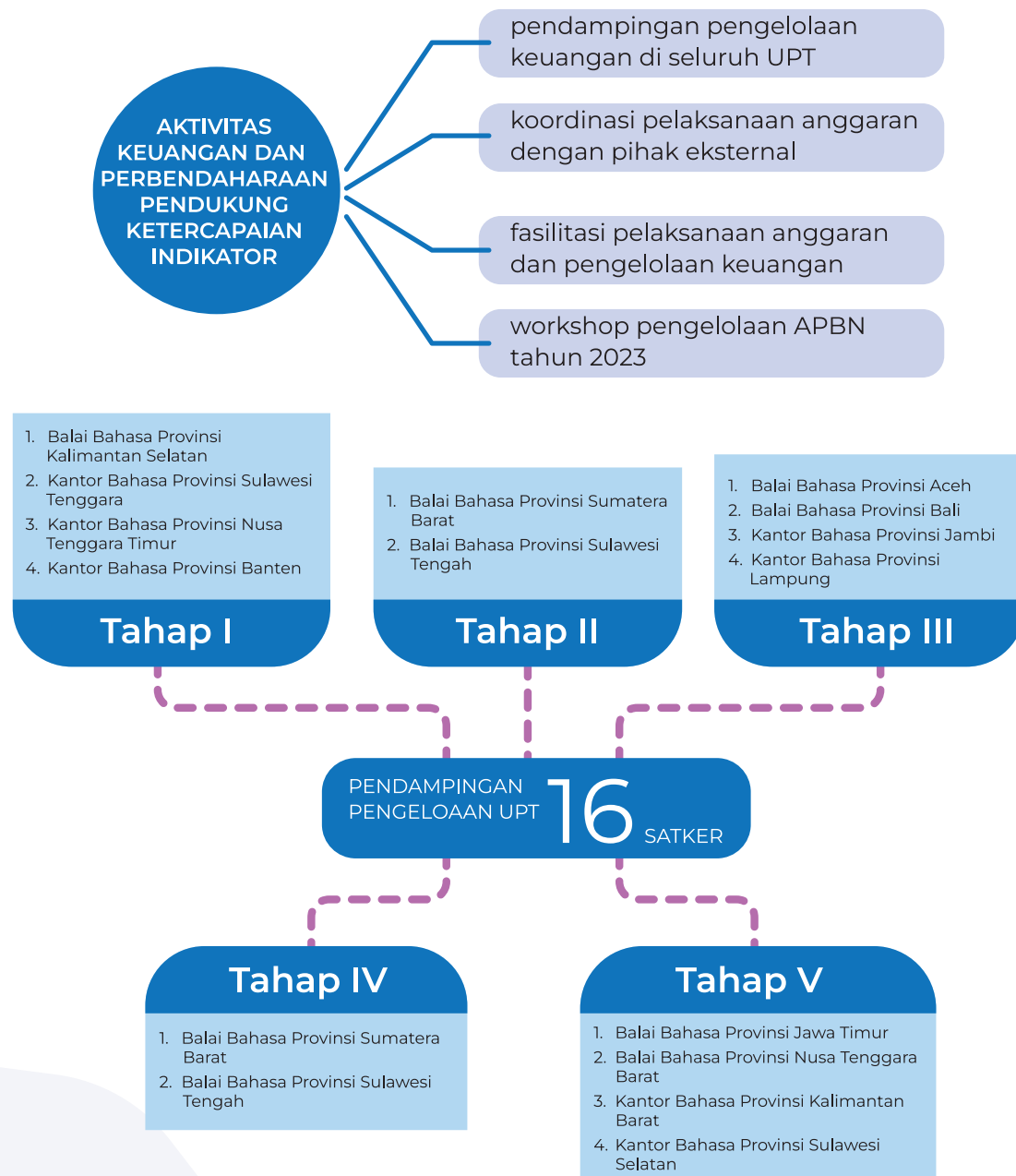


Berdasarkan aktivitas-aktivitas di Perpustakaan Badan Bahasa, tahun 2023 melalui Perpustakaan Nasional RI telah dilakukan akreditasi dengan hasil nilai B.

### c. Keuangan dan Perbendaharaan



Workshop Pengelolaan APBN tahun 2023

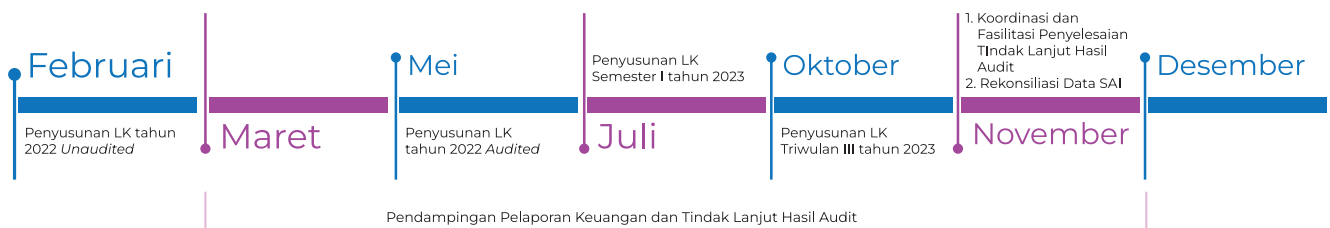




Aktivitas fasilitasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang turut mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan, bertujuan untuk mengetahui dan memahami kendala dan masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara

dengan mengurangi kemungkinan penumpukan penarikan dana di tahun anggaran 2023. Aktivitas yang dikoordinasikan oleh layanan keuangan dan perbendaharaan ini merupakan upaya Badan Bahasa dalam mencapai salah satu komponen penghitungan nilai kinerja anggaran minimal 91 pada PK satker yaitu nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Dimana ketercapaian nilai kinerja anggaran Badan Bahasa merupakan agregat dari seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa.

#### d. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan





Penyusunan laporan keuangan

Adapun salah satu indikator kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah adalah pemberian opini BPK terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, dari tahun 2013—2022. Di bawah koordinasi Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam upaya memperoleh opini WTP dari BPK dengan menyusun laporan keuangan Eselon I yang kemudian akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan K/L.

Di bawah koordinasi Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didampingi oleh tim dari BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek berhasil menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK RI maupun Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Rincian Saldo Temuan Pemeriksaan BPK Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

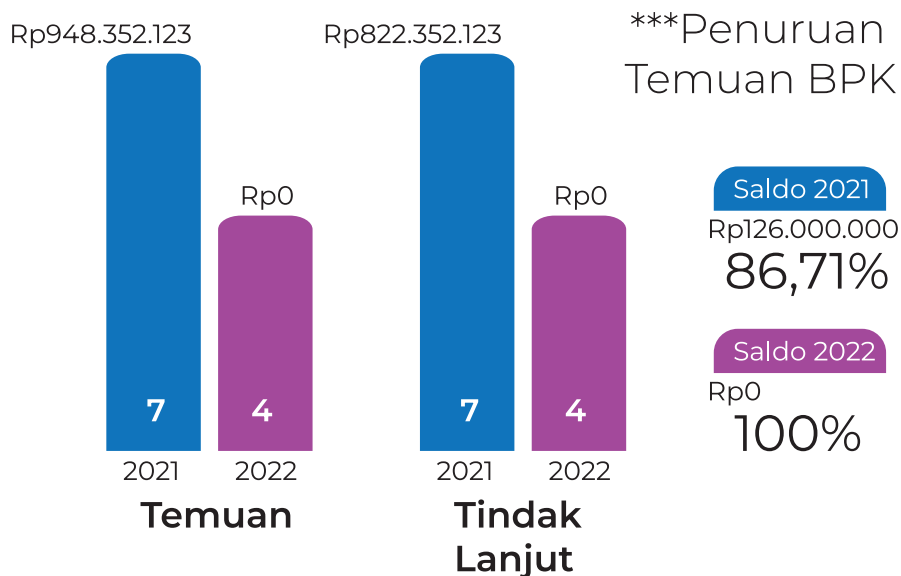
No	Tahun LK		Uraian	Saldo Temuan	Tindak Lanjut	Saldo Temuan
1	2013	LK	Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Tertib.	52.535.400	-	52.535.400
2	2014	LK	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan atas Kegiatan Belanja Modal pembangunan Gedung Badan Bahasa	130.888.999	30.000.000	100.888.999
3	2015	lk	Penerimaan kas sebesar Rp17,92 Miliar belum dilaporkan dan/atau digunakan langsung / K-1.1.4	64.335.774	64.335.774	-
3	2016	LK	Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pada Balai Bahasa Sumatera Barat dan Balai Bahasa Riau	110.994.500	16.860.000	94.134.500
4	2021	LK	Belanja modal Kemendikbudristek tidak sesuai ketentuan pada Balai Bahasa Sumatera Barat	378.615.370	252.496.000	126.119.370
5	2021	LK	Pengelolaan Keuangan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Tidak tertib	569.736.753,00	569.736.753,00	-
<b>Jumlah</b>				<b>1.307.106.796</b>	<b>933.428.527</b>	<b>373.678.269</b>
Saldo yang belum ditindak lanjuti						28,59
Total Capaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI						71,41



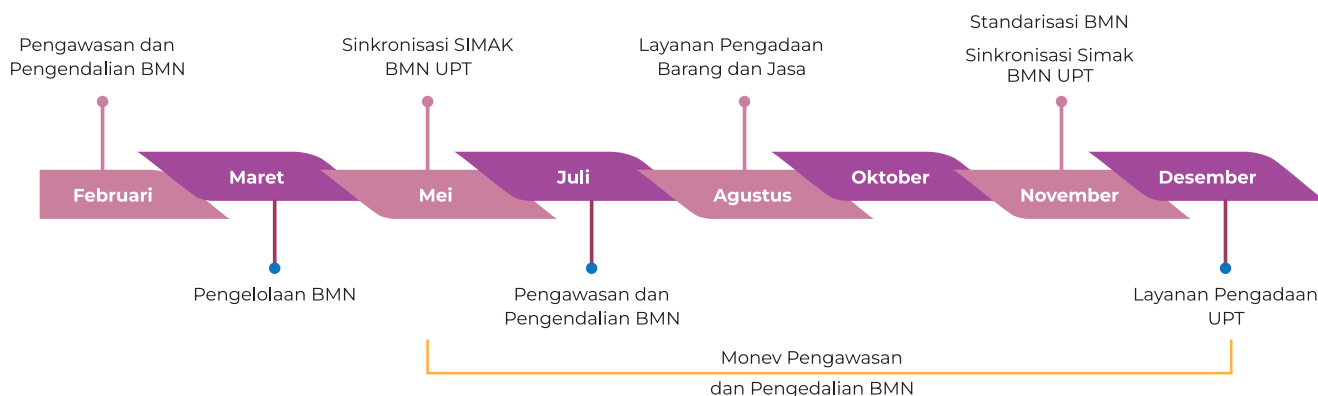
Tabel 5. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendikbudristek

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK										
No.	Satuan Kerja	Temuan		Tindak Lanjut Sesuai			Tindak Lanjut Belum Sesuai			Keterangan
		Jumlah kejadian	Nominal	Jumlah kejadian	Nominal	%	Jumlah	Nominal	%	
1	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	5	213.530.000	0	-	0	0	0	0	
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	10	36.892.248	3	19.370.221	52,50	7	17.522.027	47,50	
3	Kantor Bahasa Provinsi NTB	4	37.532.000	4	37.532.000	100,00	0	-	0,00	
4	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	6	122.580.000	6	122.580.000	100,00	0	-	0,00	
5	Kantor Bahasa Provinsi Kaltim	4	550.000	4	550.000	100,00	0	-	0,0	
6	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	7	10.024.494	7	10.024.494	100,00	0	-	0,0	
7	Balai Bahasa Provinsi Bali	8	9.303.153	8	9.303.153	100,00	0	-	0,0	
8	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	6	6.389.450	6	6.389.450	100,00	0	-	0,0	
9	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	4	25.323.085	4	25.323.085	100,00	0	-	0,0	
10	Kantor Bahasa Provinsi Babel	6	42.155.000	6	42.155.000	100,00	0	-	0,0	
11	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	5	7.617.600	0	-	0,00	5	7.617.600	100,0	
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	4	-	2	-	50,00	2	-	50,0	
13	Kantor Bahasa Provinsi Banten	8	4.045.000	6	4.045.000	75,00	2	-	0,0	
14	Balai Bahasa Provinsi Kalbar	5	17.826.129	4	17.826.129	80,00	1	-	0,0	
15	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	5	11.634.000	0	11.634.000	100,00	5	-	0,0	
16	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	4	763.500	0	-	0,00	4	763.500	100,0	
17	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	4	18.180.000	1	2.760.000	15,18	3	15.420.000	84,8	
18	Kantor Bahasa Provinsi Kep. Riau	3	10.590.000	0	-	0,00	3	10.590.000	100,0	
19	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	2	4.691.987,87	2	4.691.987,87	100,00	0	-	0,0	
20	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	5	7.128.000,00	5	7.128.000,00	100,00	0	-	0,0	
21	Kantor Bahasa Provinsi NTT	2	1.260.000	2	1.260.000	100,00	0	-	0,0	
22	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	3	3.221.200,00	3	3.221.200,00	100,00	0	-	0,0	
23	Balai Bahasa Provinsi Sumsel	4	1.800.000	4	1.800.000	100,00	0	-	0,0	
24	Balai Bahasa Provinsi Aceh	5	5.602.300	5	5.602.300	100,00	0	-	0,0	
25	Balai Bahasa Provinsi Papua	4	3.850.000	4	3.850.000	100,00	0	-	0,0	
26	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	6	108.735.000	6	108.735.000	100,00	0	-	0,0	
27	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara	4	20.962.500	4	20.962.500	100,00	0	-	0,0	
28	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	5	3.300.000	5	3.300.000	100,00	0	-	0,0	
29	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	6	8.550.000	6	8.550.000	100,00	0	-	0,0	
30	Balai Bahasa Riau	6	11.900.000	6	11.900.000	100,00	0	-	0,0	
	Jumlah	150	755.936.647	113	704.023.520	93,13	19	51.913.127	6,87	

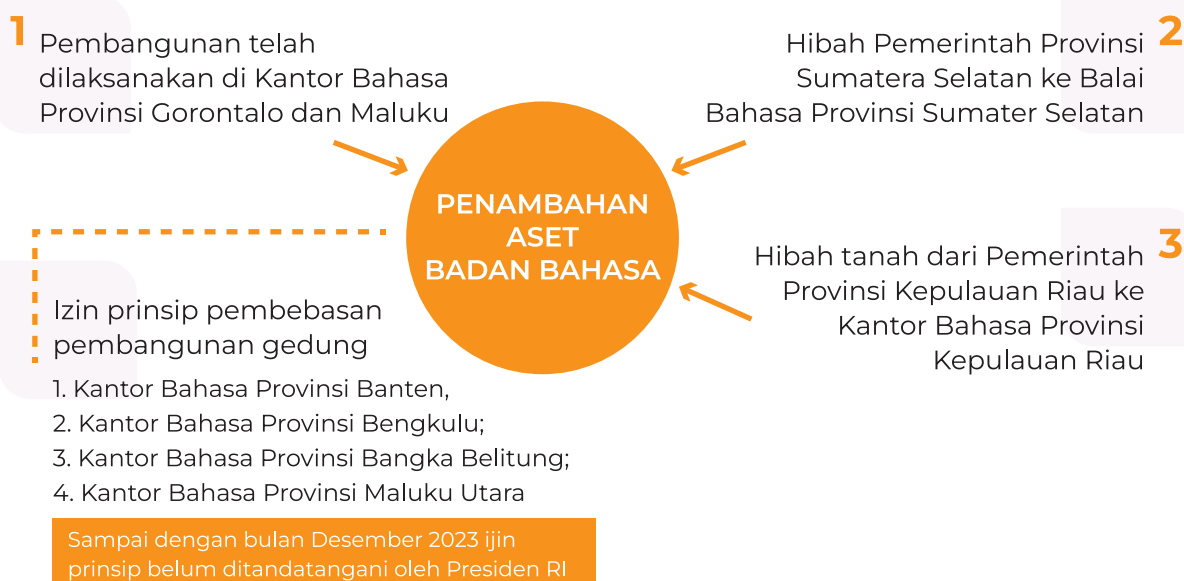
Dibandingkan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lebih meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2022 di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan tidak terdapat temuan yang bernilai material (kerugian negara).



### e. Barang Milik Negara



Dalam mendukung ketercapaian indikator, dukungan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting di seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Baik ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama, kepemilikan tanah dan gedung, maupun sarana atau fasilitas pendukung kinerja pegawai. Hal ini menjadi salah satu upaya Sekretariat Badan Bahasa untuk dapat mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan fasilitasi anggaran untuk satker yang akan diusulkan predikat ZI-WBK/WBBM di tahun 2024.



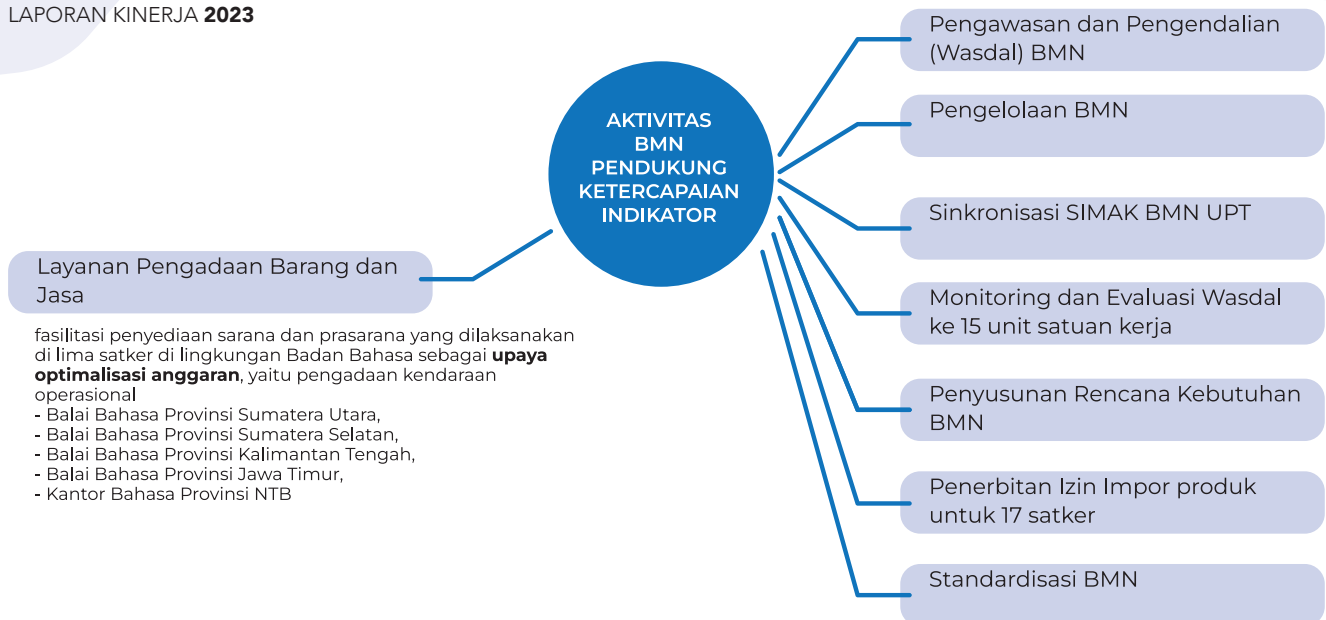
Informasi kepemilikan prasarana Balai/Kantor Bahasa sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Informasi kepemilikan prasarana Balai/Kantor Bahasa

NO	SATKER	TANAH	SERTIFIKAT	PINJAM PAKAI	PENGUNTAAN SEMEN-TARA	MENEMPATI SATKER KEMEND- IKBUDRISTEK	KETERANGAN
1	137544 - SEKRETARIAT BADAN BAHASA	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
2	414562 - BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
3	414571 - BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
4	414587 - BALAI BAHASA BALI	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
5	419007 - PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA			✓			Gedung kantor sudah ada, namun tanah milik Kementerian Pertahanan

6	419008 - PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
7	615101 - BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	✓	✓				
8	615118 - BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	✓	✓				
9	615122 - BALAI BAHASA PAPUA			✓			Gedung kantor sudah ada
10	615139 - BALAI BAHASA JAWA TIMUR	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
11	621672 - BALAI BAHASA JAWA BARAT	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
12	621686 - BALAI BAHASA JAWA TENGAH	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
13	621690 - BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
14	621708 - BALAI BAHASA RIAU			✓			Gedung kantor sudah ada, tanah pinjam pakai Pemerintah Provinsi Riau
15	621712 - BALAI BAHASA ACEH	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
16	621729 - BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN			✓			Gedung kantor sudah ada, tanah milik Pemda Provinsi Sumatera Selatan
17	621733 - BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
18	621740 - BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
19	621754 - BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
20	621761 - BALAI BAHASA SULAWESI UTARA			✓			Gedung kantor sudah ada
21	660066 - KANTOR BAHASA LAMPUNG	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
22	660070 - KANTOR BAHASA JAMBI			✓			Gedung kantor sudah ada
23	660087 - KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
24	660091 - KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
25	660109 - KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
26	680530 - KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	✓	✓			✓	Belum membangun gedung kantor
27	680544 - KANTOR BAHASA BENGKULU	✓	✓			✓	Belum membangun gedung kantor
28	680551 - KANTOR BAHASA BANTEN	✓	✓			✓	Belum membangun gedung kantor
29	680565 - KANTOR BAHASA GORONTALO	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
30	680572 - KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	✓	✓				Belum membangun gedung kantor
31	680586 - KANTOR BAHASA MALUKU	✓	✓				Gedung kantor sudah ada
32	680590 - KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	✓	✓				Belum membangun gedung kantor
33	680608 - KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR					✓	Belum memiliki tanah dan bangunan sendiri
34	690519 - PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA			✓			Gedung kantor sudah ada, namun tanah milik Kementerian Pertahanan



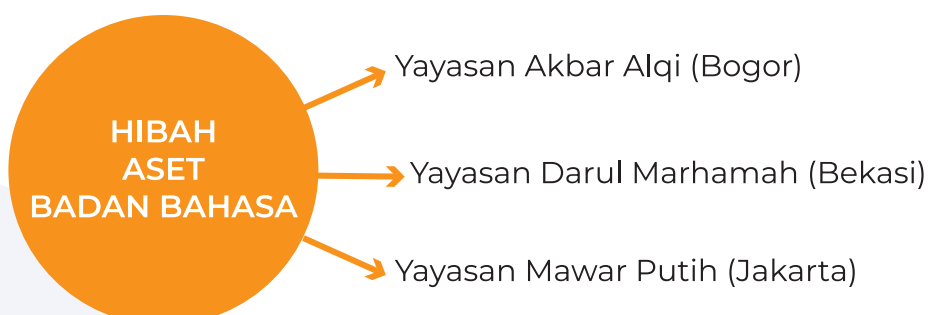


Pengadaan Kendaraan Operasional

Selain fasilitas tersebut dilaksanakan juga penyediaan fasilitas internal dengan menyediakan pendukung fasilitas perkantoran seperti penyediaan ruang unit layanan terpadu (ULT) yang di siapkan untuk pelayanan bagi tamu yang akan mendapatkan informasi tentang kebahasaan dan kesastraan maupun tamu yang akan melakukan koordinasi dengan pegawai terkait

sehingga aktivitas layanan tamu terpusat di ruang ULT.

Aktivitas lainnya yang dilaksanakan oleh tim layanan BMN di tahun 2023, yaitu hibah barang ke lembaga pendidikan/pondok pesantren/lembaga kursus. Hal ini berawal dari dampak terjadinya banjir di tahun 2021 yang melanda kawasan Jakarta serta kawasan kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dampak banjir yang cukup parah, pada tahun 2021 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan renovasi gedung di kantor Rawamangun. Dalam renovasi tersebut menghasilkan perubahan tata ruangan yang cukup signifikan sehingga menyisakan barang-barang banyak yang tidak terpakai dan akhirnya menumpuk seperti lemari, meja, kursi, dan tempat tidur wisma. Tahun 2023 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengajukan pemindahtanganan melalui penjualan namun berdasarkan masukan dari Sekretariat jenderal Kemendikbudristek barang yang masih bisa dimanfaatkan agar dihibahkan ke lembaga atau yayasan yang memerlukan. Sehingga berdasarkan masukan dan azas kebermanfaatan terhadap barang yang masih dapat digunakan, Sekretariat Badan Bahasa



Manfaat untuk Sekretariat Badan Bahasa adalah barang-barang yang tidak terpakai dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga yang menerima. Sedangkan untuk lembaga yang menerima hibah, adalah terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana yang selama ini diperlukan dalam mendukung kelangsungan aktivitas.

Secara umum, kendala yang dialami di tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKK Jumlah Satker di lingkungan yang diusulkan mendapat predikat ZI-WBK/WBBM yaitu seperti perubahan kebijakan instrumen penilaian, keterlibatan pimpinan dan pegawai, dan kesiapan satker dalam membuat inovasi belum berdampak langsung ke masyarakat sebagai pengguna layanan. Sehingga strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan pendampingan ke seluruh satker secara berkala dan intensif.

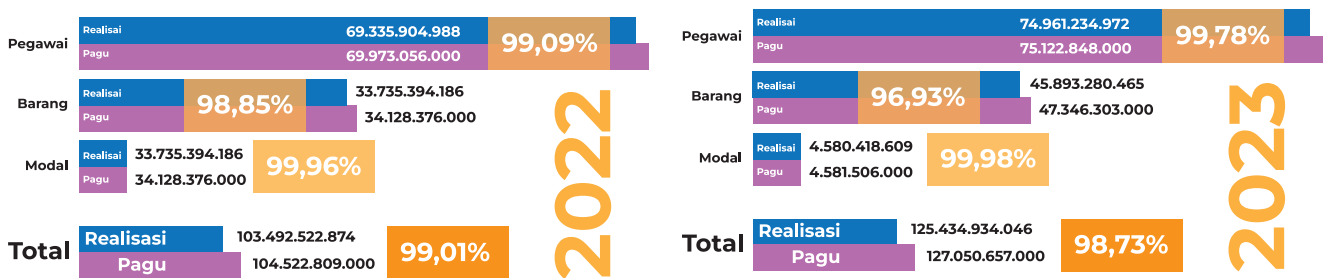
No.	Kendala	Strategi	Langkah Antisipasi
1	Perubahan kebijakan penggunaan instrumen penilaian ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemendikbudristek.	Melakukan pendampingan dengan melibatkan TPI dan Biro Ortala	Melakukan evaluasi berkala dengan berpedoman pada LHE dari KemenpanRB
2	Komitmen pimpinan dan pegawai, pelibatan satuan kerja, dan pemahaman dalam mengimplementasikan ZI-WBK/WBBM	Mengundang satker yang telah berpredikat ZI-WBK/WBBM untuk menginformasikan praktik baik yang telah dilakukan	Melakukan pelatihan pada tim ZI-WBK pada tiap satker agar menginspirasi dalam melakukan inovasi
3	Agen perubahan satker belum bisa menyampaikan inovasi dan perubahan spesifik yang terjadi di satker	Melakukan pendampingan kepada para agen perubahan dalam menyusun rencana aksi	Mengadakan perhimpunan agen perubahan di lingkungan Badan Bahasa
4	Belum semua satuan kerja memiliki kesiapan dalam mendukung pembangunan ZI-WBK/WBBM	Melakukan sosialisasi dan praktik baik satker berpredikat ZI-WBK secara berkala	Melakukan pendampingan secara berkala terkait progres dan kendala pembangunan ZI-WBK/WBBM

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Capaian Anggaran

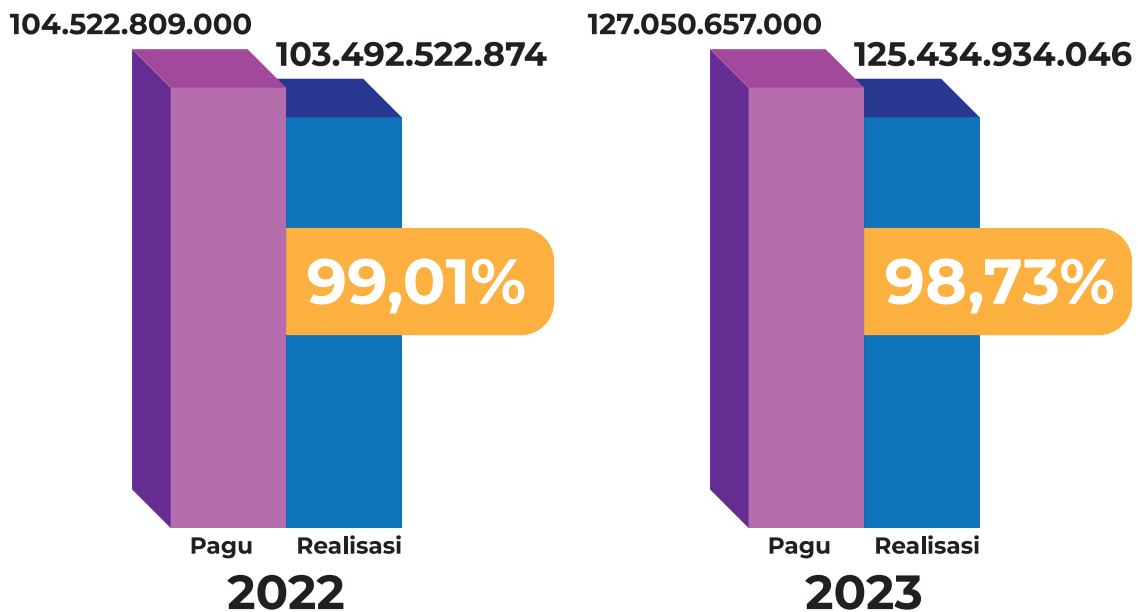
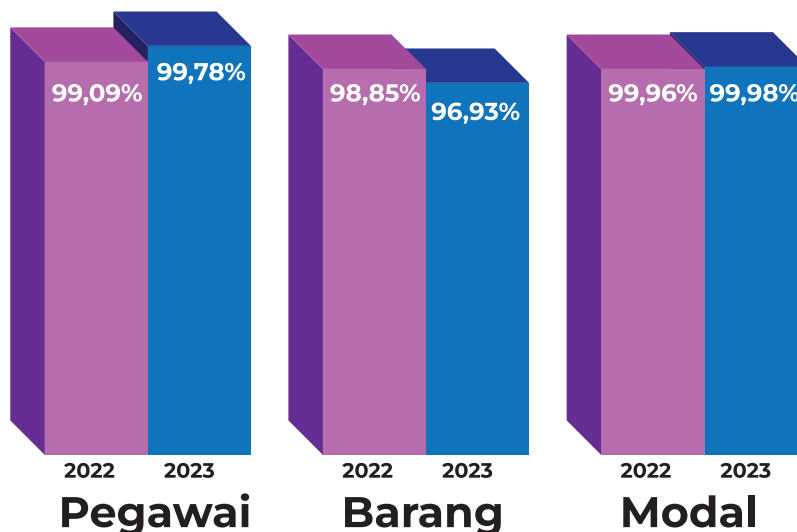
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pada tahun 2023, pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa dalam DIPA awal pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp131.133.680.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah). Sepanjang tahun 2023 terdapat enam kali penyesuaian pagu anggaran yang disebabkan oleh adanya kebijakan nasional dan pengalihan anggaran internal Badan Bahasa. Berikut rincian perubahan pagu anggaran Sekretariat BPP Bahasa di tahun 2023 dan rincian anggaran per belanja pegawai serta realisasinya per 31 Desember 2023.

## Pagu Sekretariat Badan Bahasa tahun 2023



- Pemenuhan belanja operasional Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah karena menempati gedung hibah, sarana prasarana, dan PNPB bekas kantor PPPAUD, sebesar Rp6.447.555.000,00 yang tercatat pada DIPA revisi ke-3.
- Kebijakan pengembalian belanja pegawai blokir Automatic Adjustment (AA) ke Bendahara Umum Negara (BUN) sebanyak 2 kali, sebesar Rp1.173.956.000,00 yang tercatat pada DIPA revisi ke-5 dan sebesar Rp977.115.000,- yang tercatat pada DIPA revisi ke-7.
- Optimalisasi belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran satker di lingkungan Badan Bahasa untuk memenuhi belanja operasional Sekretariat Badan Bahasa sebesar Rp4.995.044.000.
- Optimalisasi belanja pegawai untuk pemenuhan pengadaan kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Bahasa Provinsi NTB, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp479.441.000.

## Realisasi Anggaran Sekretariat BPPB tahun 2022 dan 2023

Realisasi Anggaran Sekretariat BPPB tahun 2022 dan 2023  
Berdasarkan Jenis Belanja

Hal ini karena adanya berbagai kendala teknis tiap tim kerja dalam melaksanakan jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga berpengaruh terhadap nilai konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) yang merupakan salah satu subkomponen penilaian dalam Nilai Kinerja Anggaran, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Upaya yang dilakukan oleh tim Sekretariat Badan yaitu melakukan revisi RPD yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan di triwulan sebelumnya dan menyesuaikan RPD dengan rencana pelaksanaan kegiatan triwulan berjalan.

Tabel 7. Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran per RO

Nama KRO/RO/Komponen	Fisik		Capaian	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	%
	Satuan	Target					
[2020] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				131.133.680.000	127.050.657.000	125.434.934.046	98,73
[2020.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	125.692.587.000	122.469.151.000	120.854.515.437	98,68
[2020.EAC.962] Layanan Umum	Layanan	1	2	33.414.018.000	33.135.420.000	32.296.107.194	97,47
[051] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Laporan	10	10	2.116.502.000	2.836.365.000	2.697.563.111	95,11
[052] Pelayanan Perpustakaan	Laporan	3	3	161.300.000	188.179.000	180.637.100	95,99
[053] Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Laporan	3	3	5.915.480.000	5.801.240.000	5.674.316.188	97,81
[054] Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Laporan	5	5	1.132.898.000	1.045.898.000	1.009.977.971	96,57
[055] Pelayanan Barang Milik Negara	Laporan	10	10	2.188.234.000	1.992.476.000	1.901.847.842	95,45
[056] Pelayanan SDM	Laporan	23	23	11.856.329.000	9.420.280.000	9.359.251.328	99,35
[057] Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Laporan	10	10	1.755.476.000	1.713.900.000	1.664.009.015	97,09
[058] Pelayanan Kehumasan dan Publikasi	Laporan	13	13	3.873.695.000	5.726.267.000	5.495.839.113	95,98
[059] Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	8	8	1.931.381.000	2.061.126.000	2.042.225.476	99,08
[060] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan	6	6	1.353.023.000	1.248.749.000	1.178.764.786	94,40
[061] Pelayanan Data dan Informasi	Laporan	11	11	1.129.700.000	1.100.940.000	1.091.675.264	99,16
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	92.278.569.000	89.333.731.000	88.558.408.243	99,13
[001] Gaji dan Tunjangan	Dokumen	14	14	79.549.493.000	75.122.848.000	74.961.234.972	99,78
[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Laporan	1	1	12.729.076.000	14.210.883.000	13.597.173.271	95,68
[2020.EBA] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	5.441.093.000	4.581.506.000	4.580.418.609	99,98
Layanan Sarana Internal	Unit	1	2	5.441.093.000	4.581.506.000	4.580.418.609	99,98
[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	682.800.000	850.886.000	850.599.600	99,97
[997] Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	2.294.000.000	1.778.547.000	1.777.900.500	99,96
[998] Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	Unit	1	1	2.464.293.000	1.952.073.000	1.951.918.509	99,99

Berikut merupakan alokasi anggaran per indikator kinerja kegiatan Sekretariat Badan yang telah mendukung ketercapaian kedua target IKK yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan tahun 2023.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	78,8	100	24.706.585.000	24.109.853.000	23.663.307.369	446.545.631
	"Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM"	5	9	106.427.095.000	102.940.804.000	101.771.626.677	1.169.177.323

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2023	Pagu
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	78,8	24.109.853.000
	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	102.940.804.000

Dapat ditunjukkan bahwa realisasi anggaran setiap IKK sudah optimal dengan persentase sebesar 98,15 dan 98,86. Upaya ini didukung oleh kerja bersama seluruh tim pelaksana dalam seluruh aktivitas pendukung ketercapaian indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa, baik sebagai satker mandiri maupun sebagai satker koordinator seluruh UPT di lingkungan Badan Bahasa.

## 2. Efisiensi

Efisiensi anggaran Sekretariat Badan di tahun 2023 tercapai sebesar 20% sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SMART DJA.

### Upaya Efisiensi Anggaran

a

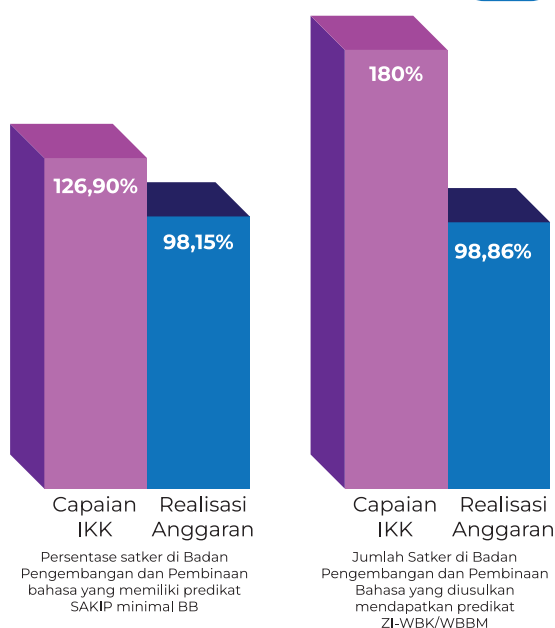
optimalisasi belanja modal untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas prasarana perkantoran berdasarkan analisis kebutuhan untuk menunjang kinerja Badan Bahasa;

b

optimalisasi kegiatan baik di dalam kantor maupun luar kantor untuk mendukung kegiatan prioritas dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan

c

pengalihan belanja operasional dan belanja pegawai seluruh satker Badan Bahasa dalam rangka optimalisasi pemenuhan sarana satker di UPT



Hal ini ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja kegiatan SAKIP sebesar 126,90% dengan anggaran yang telah mengalami efisiensi dan optimalisasi semula Rp24.706.585.000,- menjadi Rp24.109.853.000,-. Meskipun terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp596.732.000,-, dengan anggaran yang masih tersisa sebesar Rp23.513.121.000,- namun aktivitas-aktivitas yang mendukung ketercapaian indikator SAKIP dilaksanakan dengan sangat optimal. Serupa dengan penjelasan indikator terkait SAKIP, efisiensi pelaksanaan aktivitas-aktivitas pendukung indikator ZI-WBK/WBBM ditunjukkan dengan capaian sebanyak 9 satker dari target 5 satker atau sebesar 180%,



dengan kondisi adanya penyesuaian anggaran, semula Rp106.427.095.000,- menjadi Rp102.940.804.000,- atau berkurang sebesar Rp3.846.291.000,-, dan dengan sisa anggaran sebesar Rp99.454.513.000,-. Sehingga dapat terlihat bahwa antara capaian IKK dan realisasi anggaran, terdapat upaya-upaya menghemat anggaran, namun tetap dapat mengoptimalkan capaian indikator. Optimalisasi dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas-aktivitas yang mendukung ketercapaian IKK sehingga dapat tercapai efisiensi sebesar 20%.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat terlihat bahwa Sekretariat Badan Bahasa telah menggunakan anggaran sebesar 98,73% dengan rerata capaian melebihi dari target, yaitu sebesar 153,45%. Hal ini dapat ditunjukkan dengan capaian fisik berikut dengan sisa anggaran pada realisasi berikut ini.

Tabel 8. Capaian dan Realisasi anggaran per IKK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian IKK	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
[051] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	78,8	100	126,90	24.109.853.000	23.663.307.369	446.545.631	98,15
	"Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM"	5	9	180	102.940.804.000	101.771.626.677	1.169.177.323	98,86

### 3. Inovasi, Penghargaan, Program Kolaborasi/Crosscutting

#### 1. Inovasi

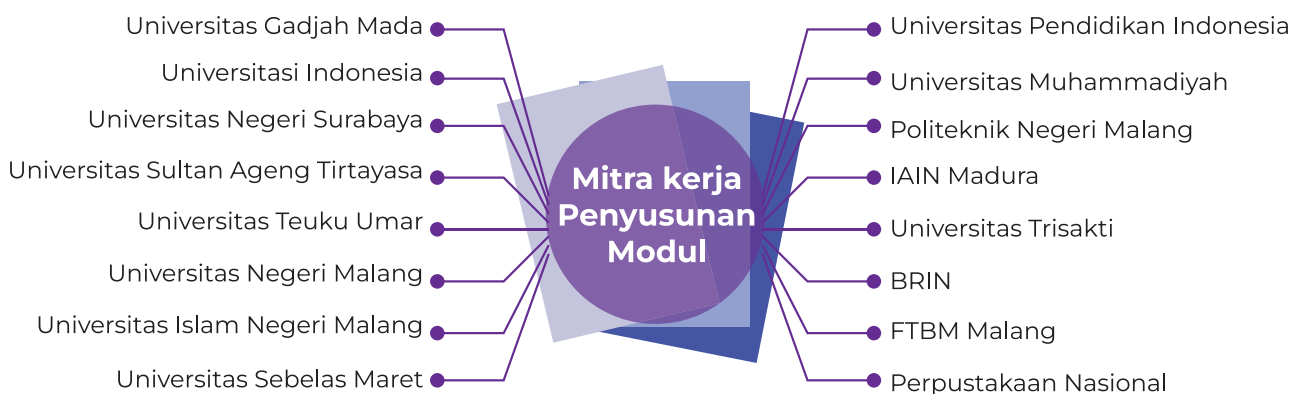
##### a) Publikasi Konten Krida Duta Bahasa



Sejak tahun 2006, Badan Bahasa menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Bahasa, yang bertujuan untuk (1) memilih Duta Bahasa yang mampu melaksanakan tugas untuk memasyarakatkan kepedulian, kecintaan, dan kebanggaan pada bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; (2) menyiapkan Duta Bahasa yang mampu mengupayakan penguatan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa dan sastra daerah, penguasaan bahasa asing strategis, serta peningkatan minat berkarya dan mengapresiasi sastra Indonesia dan daerah; serta (3) memperkuat jejaring kerja sama secara berkesinambungan antarduta bahasa dari seluruh Indonesia dalam berbagai kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra

### **b) Penyusunan 77 modul dalam rangka transformasi peningkatan kompetensi SDM.**

Penyusunan modul teknis berdasarkan jenjang merupakan kebijakan Kepala Badan Bahasa dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan modul pelatihan dan video pembelajaran untuk dimasukkan ke dalam LMS (Learning Management System) WKMB (Wiyata Kinarya Merdeka Belajar). Pelaksanaan penyusunan modul melalui WKMB merupakan strategi pengembangan kompetensi pegawai ASN Kemendikbudristek dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan pengetahuan, kecakapan, dan sikap setiap individu dalam ekosistem “Merdeka Belajar” untuk mewujudkan SDM unggul yang memiliki kapabilitas tinggi.



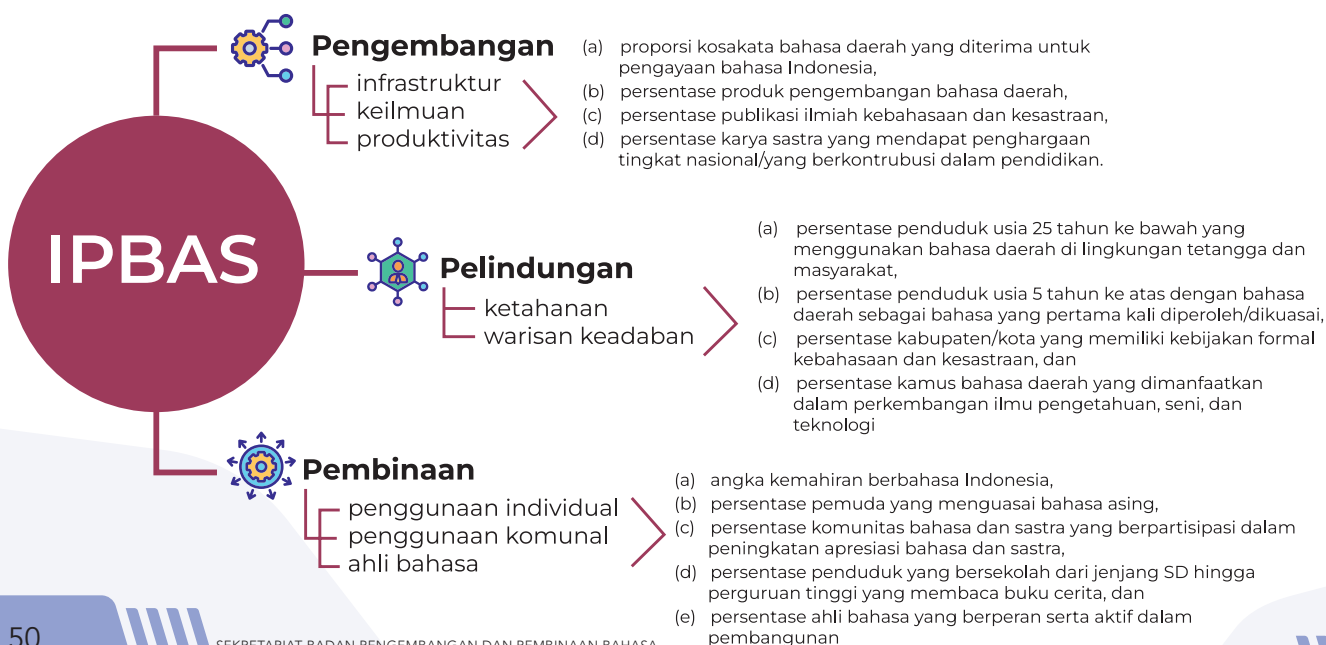
## c) Majalah Pusat



Majalah Pusat diperuntukan bagi peminat sastra, mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum lainnya. Majalah Pusat direncanakan terbit saban empat bulan sekali berisi berbagai rubrik kesastraan, Cubitan. Ini merupakan kolom tetap yang diasuh Putu Wijaya. Setiap terbitan Cubitan juga memuat tulisan dari penulis tamu. Lalu Pumpunan, rubrik yang memuat pendapat sejumlah sastrawan mengenai topik tertentu. Kemudian Taman, memuat karya sastra berupa puisi, cerpen atau drama; Selanjutnya, Telaah berisi esai, kritik atau ulasan karya sastra.

## d) Inisiasi Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan

Inisiasi IPBas merupakan inisiatif baru dari Badan Bahasa yang didukung oleh tim manajemen lingkungan Sekretariat Badan Bahasa. Penyusunan IPBas merupakan instrumen dan basis formulasi kebijakan bidang kebahasaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebahasaan dan kesastraan tingkat nasional dan provinsi.



### e) Seminoval

Penyusunan buku Seminoval Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah dan Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia ini bertujuan untuk menyajikan perjalanan program/kebijakan Revitalisasi Bahasa Daerah dan Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia dalam rangkaian cerita nyata dengan gaya novel.

Berbeda dengan laporan kegiatan, buku Seminoval ini akan memiliki alur, tokoh dengan pengalaman empiriknya, dan mungkin beberapa konflik (dalam ruang lingkup positif) beserta cara-cara penyelesaiannya. Selain itu, buku ini juga menyajikan aspek humanis yang seringkali tidak terpotret laporan standar pemerintahan.

Buku seminoval Revitalisasi Bahasa Daerah akan diterbitkan dalam 5 judul buku dan buku seminoval Literasi akan diterbitkan dalam 4 judul buku. Buku Seminoval ini akan menyajikan sumber literasi tentang kebahasaan, khususnya bahasa daerah, yang dapat dijadikan motivasi oleh penutur muda untuk meningkatkan keberpihakan mereka terhadap bahasa ibunya.

## 2. Penghargaan

### a) Sertifikat penghargaan dari Horizon tentang pengadaan malam sastra yang diserahkan oleh Taufiq Ismail.

Sejak 2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama Majalah Sastra Horison menyelenggarakan kegiatan Malam Sastra di Badan Bahasa. Tujuan kegiatan ini untuk mengajak masyarakat untuk merayakan Hari Sastra Indonesia yang diperingati setiap tanggal 3 Juli serta membangun semangat generasi muda bangsa khususnya pelajar dan mahasiswa dalam membaca sastra.



3 Juli diperingati sebagai Hari Sastra Indonesia yang dicetuskan oleh para sastrawan bertepatan dengan hari kelahiran Abdoel Moeis, wartawan, politisi, juga sastrawan terkenal yang lahir di Bukittinggi pada 3 Juli 1883.

Penentuan tanggal Hari Sastra Indonesia dilaksanakan di SMAN 2 Bukittinggi pada acara temu para sastrawan pada bulan Maret tahun 2013, yang dahulu disebut Sekolah Radja atau Kweekschool, tempat bersemayanya sastra modern Indonesia

dan lahirnya sastrawan Poedjangga Baroe.

Untuk itu, penyelenggaraan Malam Sastra di Badan Bahasa dirasa perlu agar generasi muda mengetahui dan membaca karya para sastrawan Indonesia tersebut dan karya sastrawan masa sekarang dan masa akan datang.

Atas kolaborasi selama dua tahun berturut-turut tersebut, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan Piagam Penghargaan dari pendiri Majalah Sastra Horison, Taufiq Ismail, yang diberikan pada 10 Juli 2023.



### b) Unit Kerja Berprestasi tingkat Kemendikbudristek dari Inspektorat Jenderal



Gebyar dan Malam Anugerah (Gema) Pengawasan merupakan perhelatan perdana dari Inspektorat I Kemendikbudristek yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan pada mitra kerja Itjen, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Acara ini turut disiarkan secara langsung melalui Kanal Indonesiana TV pada tanggal 6 November 2023.

Satker yang mendapatkan penghargaan di lingkungan Badan Bahasa selain Sekretariat Badan, yaitu Badan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Balai Bahasa Provinsi Bali, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### c) Sekretariat Badan Bahasa sebagai satker Terbaik Pertama Implementasi SAKIP Tingkat Eselon II di lingkungan Kemendikbudristek



Sekretariat Badan Bahasa dan Badan Bahasa berhasil meraih Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Kategori Unit Organisasi Eselon I dan II dengan nilai 90,00. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kepada Kepala Badan Bahasa dan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atas Implementasi SAKIP, Kinerja Anggaran, dan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022 pada tanggal 30 Maret 2023.

Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek merupakan wujud apresiasi atas komitmen seluruh unit kerja dan satuan kerja dalam

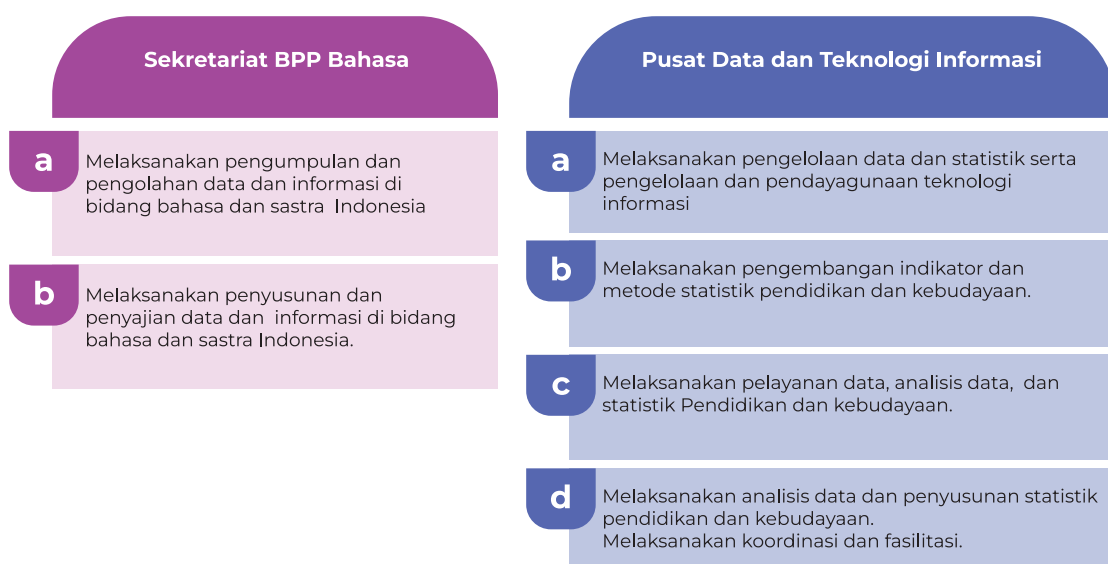
memastikan kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan prinsip good governance. Berbagai capaian dan kebermanfaatan yang telah terwujud melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar merupakan hasil kinerja dari seluruh unit kerja dan satuan kerja dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan Kemendikbudristek.

### 3. Program Kolaborasi

Pada tahun 2023, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan beberapa kegiatan lintas fungsi atau crosscutting/collaborative dengan beberapa lembaga/instansi, baik internal maupun eksternal Kemendikbudristek. Kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut.

#### a. **Pengelolaan Data dan Informasi Kebahasaan dan Kesastraan**

##### Peran Satker dalam Kolaborasi



Dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia dan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Badan Bahasa melakukan kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mengenai pengelolaan data dan informasi kebahasaan dan kesastraan.

Program tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan pangkalan data tunggal kebahasaan dan kesastraan dalam menciptakan tata kelola data yang terpadu, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas data yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan, sehingga menghasilkan data kebahasaan dan kesastraan yang representatif untuk memenuhi kebutuhan data di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Bahasa dengan Pusdatin menghasilkan produk sebagai berikut.



## 1) Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2023



## 4 Bab

- a** Obyek Kebahasaan dan Kesastraan;
- b** Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan
- c** Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan
- d** Substansi Kebahasaan dan Kesastraan



## 2) Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Badan Bahasa bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Biro Hukum, menyusun petunjuk teknis pengelolaan data kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Petunjuk teknis yang telah disusun akan dijadikan sebuah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan disejajarkan dengan petunjuk teknis Dapodik dan Dapobud serta PDDikti yang ada di lingkungan Kemendikbudristek.



Tujuan dari rancangan Kepmendikbudristek ini adalah untuk memastikan keselarasan dengan peraturan mengenai tata kelola data dan TIK di level nasional yang selaras dengan peraturan presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berikut rancangan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan.

## b. Penerbitan Jurnal Rampak Serantau



Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) memutuskan pada Sidang Eksekutif ke-32 tahun 1993 di Bogor, Indonesia, untuk menerbitkan (secara bergilir) sebuah jurnal berkala yang dinamai Rampak Serantau. Tujuan dari penerbitan jurnal ini adalah untuk memasyarakatkan karya ilmiah berupa tinjauan maupun dari hasil penelitian di berbagai bidang di ketiga negara anggota. Makalah yang dimuat dalam Rampak Serantau berasal

dari masing-masing tujuh orang penulis dari setiap negara anggota Mabbim.

Selain makalah mengenai kebahasaan, Rampak Serantau juga menyajikan makalah yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, yang dalam dua dekade terakhir ini telah berkembang secara dinamis. Sehubungan dengan itu, Rampak Serantau selalu menyajikan beragam topik yang mutakhir. Meskipun gaya bahasa penulisan dalam jurnal ini mengacu pada aturan ejaan di setiap negara anggota, jurnal ini tetap memperhatikan keterbacaan sehingga dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang menarik.

## c. Penyelenggaraan Malam Sastra

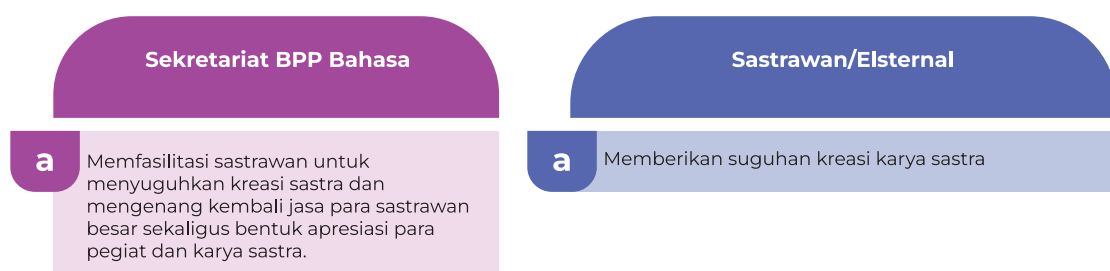
Pada peringatan Hari Sastra Indonesia ke-10 tahun 2023, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan Majalah Sastra Horison menyelenggarakan Malam Sastra 2023, di Kantor Badan Bahasa, Rawamangun, Jakarta. Penyelenggaraan Kegiatan Malam Sastra dilaksanakan untuk mengenang kembali jasa para sastrawan besar sekaligus bentuk apresiasi para pegiat dan karya sastra.



Dokumentasi Malam Sastra tahun 2023

Kegiatan Malam Sastra di Badan Bahasa dihadiri oleh para sastrawan, penggerak literasi, dan pelaku budaya yang mempersembahkan penampilan sastra, seperti musikalisasi puisi, pembacaan puisi oleh Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, dan Peri Sandi Huizche. Selain itu, ada pembacaan cerpen oleh Putu Wijaya serta musikalisasi oleh Rinidiyanti Ayahbi. Kemudian, penonton juga disuguhkan dengan hiburan grup musik dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan Fryda. Pada kesempatan terpisah, salah satu pengisi acara, Rinidiyanti Ayahbi yang membawakan aransemen puisi karya Taufiq Ismail berjudul 'Siluet' lewat solo gitar, menyampaikan bahwa acara Malam Sastra jadi wadah untuk meningkatkan kualitas sastra di Indonesia.

## Peran Satker dalam Kolaborasi



### d. Sosialisasi Program Prioritas Badan Bahasa bersama Komisi X DPR-RI

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit kerja yang melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang bahasa dan sastra perlu memastikan adanya partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan saat ini dan penyusunan kebijakan ke depan. Hal tersebut sangat penting karena masyarakat sebagai pengguna bahasa dan pelaku kebahasaan memiliki pengalaman dan pemahaman yang unik tentang bahasa dan kebutuhan bahasa mereka.

Partisipasi publik dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya mencerminkan perspektif pemerintah, tetapi juga aspirasi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Partisipasi publik juga dapat membantu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengidentifikasi isu kebahasaan di masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang disusun efektif.

Untuk mendorong partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pemerintah

di bidang kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu membuka ruang konsultasi publik, mendengarkan masukan dari kelompok masyarakat, dan mengadakan forum diskusi atau pertemuan terbuka dengan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan mengadakan diseminasi program prioritas bidang kebahasaan dan kesastraan dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Badan Bahasa.

## Kolaborasi dengan Komisi X DPR

- 1 Kabupaten Purwakarta**  
Ketua Komisi H. Syaiful Huda
- 2 Kota Medan**  
Anggota Komisi dr. Sofyan Tan
- 3 Kota Jakarta Timur**  
Anggota Komisi Putra Nababan
- 4 Kota Tegal**  
Wakil Ketua Komisi Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.
- 5 Kabupaten Penajam Paser Utara**  
Wakil Ketua Komisi Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
- 6 Kota Sukabumi**  
Anggota Komisi Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi.



### Sekretariat BPP Bahasa

- a** Melakukan fasilitasi sosialisasi dan merekapitulasi masukan



### Komisi X DPR

- a** Menyosialisasikan 3 program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- b** Menjaring masukan dari masyarakat tentang program kebahasaan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan

## e. Penajaman isu kebahasaan dan kesastraan

Sekretariat Badan Bahasa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Bahasa, dilaksanakan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Berikut kolaborasi yang dilaksanakan.





### Sekretariat BPP Bahasa

- a** Menyediakan data kebahasaan dan kesastraan sebagai sumber yang perlu disensus oleh BPS.
- b** Memunculkan substansi di bidang kebahasaan dan kesastraan di narasi RPJMN 2025—2029



### Badan Pusat Statistik

- a** Menitipkan pertanyaan perihal kebahasaan yang akan disertakan dalam sensus/survei BPS.
- b** Memasukkan isu kebahasaan dalam narasi RPJMN 2025—2029.



### Sekretariat BPP Bahasa

- a** Menyusun analisis kebutuhan substansi bidang kebahasaan dan kesastraan yang akan diatur di dalam naskah akademik peta jalan literasi nasional
- b** Menyusun usulan masukan terhadap RUU Bahasa Daerah
- c** Menyusun indeks pembangunan kebahasaan (IPBas)



### Kemenko PMK

- a** Menyusun naskah akademik tentang peta jalan literasi nasional
- b** Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah
- c** Memberikan dukungan tenaga teknis dalam penyusunan indeks pembangunan kebahasaan (IPBas)

## f. Peningkatan Literasi melalui kegiatan “Membaca Raden Saleh”



Membaca Raden Saleh merupakan kegiatan Sekretariat Badan Bahasa bersama dengan Reading Group PdT. Membaca Raden Saleh berawal dari pertemuan antara dua penulis, yaitu Kurnia Effendi dan Iksaka Banu, serta editornya, yaitu Endah Sulwesi, Wien Muldian, dan Kanti W. Janis. Iksaka Banu dan Kurnia Effendi sebagai penulis novel Pangeran dari Timur sejak 1999 memiliki obsesi tentang pelukis bernama Raden Saleh. Dalam novel itu dua penulis memanusiaikan Raden Saleh yang hidup di abad ke-19: 1813—1880. Tujuan dari kegiatan Membaca Raden Saleh adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus mengenalkan sosok Raden Saleh. Sekretariat Badan Bahasa memfasilitasi peserta sebanyak 100 orang, 85 orang di antaranya terdiri atas pustakawan, sastrawan, pengarang buku, dan mahasiswa.

## BAB IV

# PENUTUP

### A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Sekretariat Badan di tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena mengalami peningkatan capaian kinerja dengan rata-rata sebesar 153,5% dari dua indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Capaian didukung oleh kinerja realisasi anggaran sebesar Rp125.434.934.046,- atau 98,73%, dari total pagu Rp127.050.657.000.

Tabel 9. Capaian IKK tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Capaian	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB (%)	132,01%	78,8	100	126,90%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Capaian	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)	9	5	9	180%

Tabel 10. Sandingan Pagu Awal Pagu Akhir dan Realisasi per IKK tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2023	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	78,8	24.706.585.000	24.109.853.000	23.735.517.369
	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	106.427.095.000	102.940.804.000	101.766.552.677



Tabel 11. Sandingan Realisasi Anggaran per KRO tahun 2022 dan 2023

KRO/RO/Komponen	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
				Pagu	Realisasi	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	104.522.809.000	103.492.522.874	99,01	127.050.657.000	125.434.934.046	98,73
Layanan Dukungan Manajemen Internal	104.101.432.000	103.071.299.174	99,01	122.469.151.000	120.854.515.437	98,68
Layanan Umum	23.483.758.000	23.213.435.646	98,85	33.135.420.000	32.296.107.194	97,47
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	421.377.000	421.223.700	99,96	4.581.506.000	4.580.418.609	99,98

Secara umum hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan di Sekretariat Badan Bahasa, yaitu.



1

Belum semua pimpinan dan pegawai memiliki komitmen dan pemahaman dalam mengimplementasikan ZI-WBK/WBBM.

2

Konsistensi seluruh pimpinan dan pegawai dalam mengimplementasikan SAKIP.

## B. Langkah Yang Akan Dilakukan Di Masa Mendatang Untuk Meningkatkan Kinerja

Di Tahun 2022, Sekretariat Badan Bahasa telah merencanakan melakukan langkah-langkah di masa mendatang yang ditindaklanjuti di tahun 2023. Berikut merupakan tindak lanjut langkah-langkah perbaikan dan hasil tindak lanjut di tahun 2023.

### Langkah-langkah masa mendatang di Lakin 2022

1

Melakukan pendampingan pada setiap satuan kerja dan mengoptimalkan peran asesor RBI zserta pemanfaatan aplikasi SIAZIK.

2

Menyusun peta kompetensi untuk peningkatan mutu SDM, serta menyediakan program dan anggaran untuk meningkatkan mutu SDM.

3

Melengkapi sarana dan prasarana serta pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.

4

Menyusun petunjuk teknis penggunaan aplikasi sebagai acuan seluruh satuan kerja dan pemangku kepentingan

### Tindak lanjut langkah-langkah perbaikan di tahun 2023

1

Melakukan sosialisasi dan pendampingan ke setiap satuan kerja bersama tim penilai internal (TPI) Kemendikbudristek.

2

Melibatkan asesor dalam kegiatan pendampingan ke satuan kerja yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM.

3

Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pengisian LKE dengan aplikasi SIAZIK ke seluruh satuan kerja.

1

Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan bagi SDM untuk peningkatan kompetensi di setiap layanan, baik yang dilaksanakan dari internal Kemendikbudristek maupun eksternal.

1

Melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana di seluruh satker

2

Menyusun mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana

1

Menyusun mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data pokok kebahasaan dan kesastraan.

### Hasil Tindak Lanjut

1

Meningkatnya pemahaman Tim ZI-WBK di satuan kerja.

2

Meningkatnya nilai pemenuhan di setiap komponen pengungkit.

3

Meningkatnya nilai kinerja evaluasi tiap satker menggunakan aplikasi SIAZIK, dengan nilai 75 untuk satker ZI-WBK dan 80 untuk satker ZI-WBBM.

1

Meningkatnya jumlah pegawai di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang lulus dalam uji kompetensi jabatan fungsional widyabasa maupun jabatan fungsional tertentu (IJFT).

1

Tersusunnya hasil analisis kebutuhan sarana prasarana di setiap satker

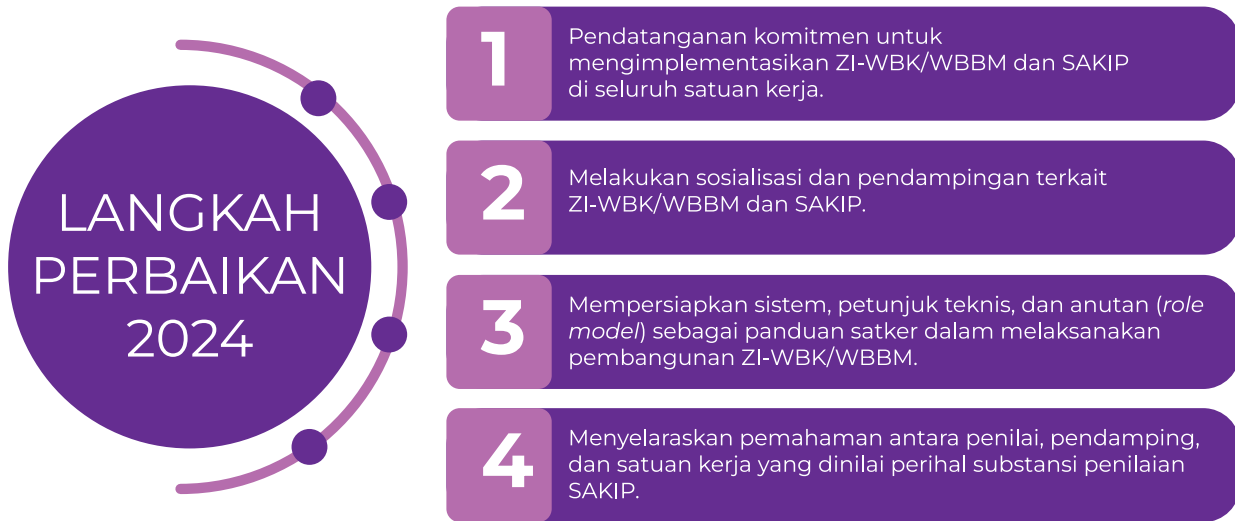
2

Tersusunnya draf Prosedur Operasional Standar pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1

Tersusunnya Rancangan Kepmendikbudristek tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan.

Dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilaporkan tersebut di atas, Sekretariat Badan Bahasa perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pada tahun 2024 sebagai berikut.







**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**Dengan**  
**Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hafidz Muksin**

**Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : E. Aminudin Aziz**

**Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,**



**E. Aminudin Aziz**

**Sekretaris Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,**



**Hafidz Muksin**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	78.80
		[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 131.133.680.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 131.133.680.000</b>

Jakarta, 30 Januari 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,**

**Sekretaris Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,**



**E. Aminudin Aziz**



**Hafidz Muksin**





**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Sekretaris Badan Pengembangan dan**  
**Pembinaan Bahasa**  
**Dengan**  
**Kepala Badan Pengembangan dan**  
**Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hafidz Muksin**

**Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : E. Aminudin Aziz**

**Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan**  
**Pembinaan Bahasa,**



**E. Aminudin Aziz**

**Sekretaris Badan Pengembangan dan**  
**Pembinaan Bahasa,**



**Hafidz Muksin**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	78.80
		[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 127.050.657.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 127.050.657.000</b>

Jakarta, 18 Desember 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,**



**E. Aminudin Aziz**

**Sekretaris Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,**



**Hafidz Muksin**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330

Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0326/11/PR.06.00/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

TAHUN 2023

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);



8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- b. menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;

- c. menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- d. merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- e. menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- f. menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- g. memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
NOMOR 0326/11/PR.06.00/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
BAHASA  
TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAKIP  
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Hafidz Muksin	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat BPP Bahasa	Ketua Tim
3.	Ratna Perwitosari	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
4.	Yessy Rosalina	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
5.	Oka Wahyu Setia A.	Analisis Jabatan	Anggota
6.	Sunardi	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
7.	Nova ardryansyah	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota

8.	Akhmad Susanto	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
9.	Dede Saputra	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
10.	Ferry Cahyadi	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
11.	Meryna Afrila	Analisis Kerja Sama	Anggota
12.	Danang Harry Wibowo	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
13.	Uud Suyuhuddin	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
14.	Dinar Kartika Apriliani W.	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
15.	Yiying Yuningsih	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
16.	Nurjaman	Penyusun Informasi dan Publikasi	Anggota

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330

Telepon: (021) 4706287; Laman [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0327/11/PR.06.00/2023

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

TAHUN 2023

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Reviu LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

KEDUA : Tim Reviu LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 berkualitas; dan

- b. menyusun rekomendasi hasil revidi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
NOMOR 0327/I1/PR.06.00/2023  
TENTANG  
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TAHUN 2023

TIM REVIU LAKIP

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Margiyati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Ketua Tim
2.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
3.	Yessy Rosalina	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
4.	Tri Indira Satya Pancawardhana	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5.	Oka Wahyu Setiya Adi	Analisis Jabatan	Anggota

SEKRETARIS BADAN,

  
HAFIDZ MUKSIN

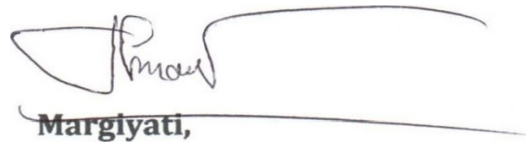
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah melakukan reviu laporan kinerja SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA untuk tahun anggaran 2023. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab tim reviu Lakin SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bali, 24 Januari 2024  
Ketua Tim Reviu,

  
**Margiyati,**

NIP 196706091990012001





**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
Tahun 2023**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan TW 4**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	78.80	<b>TW4 : 78.8</b>	<b>TW4 : 100</b>	<p><b>TW4 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>Pada triwulan IV, hasil tindak lanjut rekomendasi dari pelaksanaan pendampingan mandiri SAKIP oleh Biro Perencanaan, yaitu. 1. Sekretariat Badan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan, Kemendikbudristek untuk meminta pendampingan terkait pengukuran capaian kinerja sehingga permasalahan aplikasi terselesaikan dan pendampingan tersebut sudah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kemendikbudristek 2. Sekretariat Badan telah melakukan monitoring dan evaluasi dan pendampingan ke seluruh satker yang menjadi target peningkatan evaluasi SAKIP. 3. Sekretariat Badan telah melaksanakan pendampingan terhadap satker yang sudah lolos tim penilaian internal kemendikbudristek serta kolaborasi dengan Biro Ortala dan Itjen. 4. Beberapa satker UPT telah melaksanakan patok banding kepada satker yang telah lolos ZI-WBK (Balai Bahasa Yogyakarta dan Jawa Tengah) 5. Sekretariat telah melaksanakan peningkatan mutu SDM SAKIP dan ZI WBK kepada sejumlah pegawai Sekretariat Badan dan satker UPT serta pimpinan satker dan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kemendikbudristek. 6. Pegawai yang telah mengikuti diklat SAKIP sudah mendapatkan sertifikat diklat yang dikirim oleh lembaga terkait. Layanan Kepegawaian akan bekerja sama dengan Layanan Data dan Informasi, akan memunculkan fitur baru pada aplikasi gesit terkait informasi diklat yang sudah diikuti oleh pegawai. Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB sampai dengan triwulan IV tahun 2023, yaitu. 1. Reviu LAKIN 2022, Penyusunan LAKIN 2022, Tinjau LHE 2022, Penyusunan PK, Rencan Aksi, Pengukuran Kinerja 2. Evaluasi&amp;Reviu renstra yang telah dilaksanakan bersama 7 KKLP Badan Bahasa 3. Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran triwulan II bersama Itjen dan Biro Perencanaan 4. rapat evaluasi rutin triwulanan 5. Pendampingan awal dokumen data dukung SAKIP yang diikuti oleh seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa dengan Biro Perencanaan. 6. Sekretariat Badan Bahasa berkolaborasi dengan Pusdiklat Kemdikbudristek, juga telah melaksanakan diklat SAKIP Angkatan 11-14 melalui metoda daring yang diikuti oleh seluruh petugas pelaporan di lingkungan Badan Bahasa selama 6 hari berturut-turut. 7. Sekretariat Badan Bahasa berkolaborasi dengan Pusdiklat Kemdikbudristek, juga telah melaksanakan diklat SAKIP untuk tingkat pimpinan. 8. Penilaian Mandiri SAKIP satker di lingkungan Badan Bahasa 9. Pendampingan SAKIP 9 satker di lingkungan Badan Bahasa 10. Penilaian Mandiri SAKIP 11. Penilaian SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal 12. Klarifikasi dan konfirmasi penilaian SAKIP pada masa sanggah bersama dengan Inspektorat Jenderal 13. Finalisasi Penilaian SAKIP</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>1. Terdapat beberapa perubahan berupa penambahan dokumen data dukung SAKIP di tahun 2023. 2. Perbaikan aplikasi yang digunakan sebagai media unggah dokumen data dukung SAKIP menyebabkan satker harus mengulang mengunggah kembali beberapa data dukung yang diatur ulang oleh operator utama aplikasi. 3. terdapat perbedaan nilai SAKIP hasil penilaian oleh tim Inspektorat Jenderal.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Sekretariat Badan melakukan pendampingan, evaluasi dan pendokumentasian dokumen data dukung penilaian SAKIP, dan 2. Petugas pelaporan mendokumentasikan data dukung SAKIP pada google drive untuk mengantisipasi adanya galat atau perbaikan aplikasi. 3. melakukan klarifikasi dan konfirmasi pada masa sanggah SAKIP.</p>

2	[SK 1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM	Satker	5	<b>TW4 : 5</b>	<b>TW4 : 0</b>	<b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Di tahun 2023, seleksi satker untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat melakukan pendampingan pada tiap satuan kerja yang diusulkan bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat Jenderal selaku TPI Kementerian. Biro organisasi dan tata laksana menggunakan aplikasi SIAZIK untuk melakukan pengisian LKE dan juga pelaksanaan survei eksternal terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang merupakan bagian penilaian ZIWBK/WBBM yang telah dilakukan tiap satker yang diusulkan. Tahap diawali dengan seleksi calon satker ZI-WBK/WBBM oleh asesor Badan Bahasa yang telah memenuhi syarat pengusulan sesuai dengan PermenpanRB No 90 Tahun 2021 (Januari s.d. Februari). Strategi yang dilakukan pada tahap ini adalah bersurat ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan Bahasa untuk melakukan pencaanangan, mengisi LKE ZI melalui SIAZIK, dan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) secara berkala pada bulan Februari, dan melakukan koordinasi dengan Biro Ortala dan Inspektorat 1 untuk melakukan Evaluasi Awal ZI-WBK/WBBM. Kemudian, asesor Badan Bahasa melakukan reviu progres pengisian LKE melalui SIAZIK. Berdasar hasil reviu Asesor Badan Bahasa, diusulkan 9 satker yang terdiri dari 1 WBBM yaitu Pusbin dan 8 satker WBK yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi DIY, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi NTB, dan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesembilan satker tersebut, berdasarkan hasil dari pendampingan auditor Inspektorat I dan pendampingan daring oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, lolos sebagai satker yang meraih predikat ZI-WBK/WBBM Kemendikbudristek setelah tahap evaluasi TPI. Sehingga di tahun 2023, capaian satker di lingkungan Badan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, sebanyak 9 satker dari target 5 satker, berdasarkan hasil pendampingan dari tim RB Badan Bahasa dan Inspektorat Jenderal selaku tim TPI. Capaian tersebut terealisasi pada saat TW II berjalan namun dilaporkan pada triwulan III. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Belum adanya kesadaran dari seluruh pegawai dalam menjalankan pembangunan ZI-WBK/WBBM. 2. Belum adanya inovasi yang berdampak langsung terhadap pelayanan ke masyarakat. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Melakukan pendampingan dengan melibatkan TPI dan Biro Ortala. 2. Mengundang satker yang telah berpredikat ZI-WBK/WBBM untuk menginformasikan praktik baik yang telah dilakukan.
---	--	---	--------	---	----------------	----------------	---

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 4	Anggaran	
1	Layanan Umum	1	Layanan	1	Rp. 33.135.420.000	
2	[051] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	10	laporan	10	Rp. 2.836.365.000	
3	[052] Pelayanan Perpustakaan	3	laporan	3	Rp. 188.179.000	
4	[053] Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	laporan	3	Rp. 5.801.240.000	
5	[054] Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	5	laporan	5	Rp. 1.045.898.000	
6	[055] Pelayanan Barang Milik Negara	10	laporan	10	Rp. 1.992.476.000	
7	[056] Pelayanan SDM	23	laporan	23	Rp. 9.420.280.000	
8	[057] Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10	laporan	10	Rp. 1.713.900.000	
9	[058] Pelayanan Kehumasan dan Publikasi	13	laporan	13	Rp. 5.726.267.000	
10	[059] Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal	8	laporan	14	Rp. 2.061.126.000	
11	[060] Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	6	laporan	6	Rp. 1.248.749.000	
12	[061] Pelayanan Data dan Informasi	11	laporan	11	Rp. 1.100.940.000	
13	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Rp. 89.333.731.000	
14	[001] Gaji dan Tunjangan	14	laporan	14	Rp. 75.122.848.000	
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	laporan	1	Rp. 14.210.883.000	
16	Layanan Sarana Internal	1	Unit	1	Rp. 2.629.433.000	
17	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	unit	1	Rp. 850.886.000	
18	[997] Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1	unit	1	Rp. 1.778.547.000	
19	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1	Rp. 1.952.073.000	
20	[998] Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	1	unit	1	Rp. 1.952.073.000	
TOTAL JUMLAH PAGU						Rp. 127.050.657.000





# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT BADAN  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN BAHASA



## **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,  
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

